



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Tahun 2023-2043.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO TAHUN 2024 – 2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP I. Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
28. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
29. Terminal penumpang tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
30. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

32. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Distribusi Lainnya adalah Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
35. Gardu Distribusi adalah Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
36. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat Menara BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
39. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
40. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan irigasi tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
42. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
43. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
44. Prasarana irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
45. Bangunan penampung air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
46. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

47. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
48. Hidran umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
49. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
50. Jaringan transmisi air minum yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik
52. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
53. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
54. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
55. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder
58. Jaringan drainase lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
59. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
60. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
63. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

65. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
66. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
67. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
69. Zona Konservasi dengan kode KS adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
70. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
71. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
73. Zona Pertanian dengan kode P, adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan usaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
74. Zona Perikanan dengan kode IK, adalah peruntukan ruang perikanan.
75. Zona Pariwisata dengan kode W, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
76. Zona Perumahan dengan kode R, adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
77. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi,

dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.

78. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
79. Zona Perkantoran dengan kode KT, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Transportasi dengan kode TR, adalah peruntukan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
81. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
82. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
83. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
84. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
85. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
86. Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM adalah Daerah suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
87. Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar
88. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
89. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

90. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
92. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
93. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-1, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
97. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
98. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
102. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

103. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
104. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
105. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
106. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air.
107. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi TES dan TEA.
108. Ketentuan khusus kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
109. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
110. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
111. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
112. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
113. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
114. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang.

115. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan, ditentukan paling sedikit dari as jalan berdasarkan kelas jalan.
116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
118. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
119. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
120. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
121. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB III RUANG LINGKUP PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. ruang lingkup WP; dan
 - b. ruang Lingkup Substansi.
- (2) Ruang lingkup WP Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 4.582,13 (empat ribu lima ratus delapan puluh dua koma satu tiga) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Ruang lingkup WP Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
- (4) Ruang lingkup WP Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sambirejo, meliputi:
 - a. Desa Blimbing dengan luas 436,31 (empat ratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektare;
 - b. Desa Sambirejo dengan luas 525,22 (lima ratus dua puluh lima koma dua dua) hektare;

- c. Desa Kadipiro dengan luas 383,72 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
 - d. Desa Musuk dengan luas 411,24 (empat ratus sebelas koma dua empat) hektare;
 - e. Desa Jetis dengan luas 449,26 (empat ratus empat puluh sembilan koma dua enam) hektare;
 - f. Desa Dawung dengan luas 674,42 (enam ratus tujuh puluh empat koma empat dua) hektare;
 - g. Desa Sambu dengan luas 616,00 (enam ratus enam belas koma nol nol) hektare;
 - h. Desa Jambayan dengan luas 741,58 (tujuh ratus empat puluh satu koma lima delapan) hektare; dan
 - i. Desa Sukorejo dengan luas 344,40 (tiga ratus empat puluh empat koma empat nol) hektare.
- (5) Ruang lingkup WP Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A, meliputi Desa Blimbing, Desa Sambirejo, dan Desa Kadipiro dengan luas 1.345,24 (seribu tiga ratus empat puluh lima koma dua empat) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 436,31 (empat ratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektar, meliputi seluruh Desa Blimbing;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 525,22 (lima ratus dua puluh lima koma dua dua) hektar, meliputi seluruh Desa Sambirejo; dan
 3. Blok I.A.3 dengan 383,72 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh dua) hektar, meliputi seluruh Desa Kadipiro.
 - b. SWP I.B, meliputi Desa Musuk dan Desa Jetis dengan luas 860,50 (delapan ratus enam puluh koma lima nol) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 411,24 (empat ratus sebelas koma dua empat) hektar, meliputi seluruh Desa Musuk; dan
 2. Blok I.B.2 dengan luas 449,26 (empat ratus empat puluh sembilan koma dua enam) hektar, meliputi seluruh Desa Jetis;
 - c. SWP I.C, meliputi Desa Dawung dan Desa Sambu dengan luas 1.290,41 (seribu dua ratus sembilan puluh koma empat satu) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 674,42 (enam ratus tujuh puluh empat koma empat dua) hektar, meliputi seluruh Desa Dawung; dan
 2. Blok I.C.2 dengan luas 616,00 (enam ratus enam belas koma nol nol) hektar, meliputi seluruh Desa Sambu.
 - d. SWP I.D, meliputi Desa Jambayan dan Desa Sukorejo dengan luas 1.085,97 (seribu delapan puluh lima koma sembilan tujuh) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 741,58 (tujuh ratus empat puluh satu koma lima delapan) hektar, meliputi seluruh Desa Jambayan; dan
 2. Blok I.D.2 dengan luas 344,40 (tiga ratus empat puluh empat koma empat nol) hektar, meliputi seluruh Desa Sukorejo;
- (6) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan kawasan agropolitan Kecamatan Sambirejo sebagai pusat ekonomi kawasan didukung sektor agribisnis, agrowisata, dan agroindustri yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK WP Agropolitan Sambirejo yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu SPPK WP Agropolitan Sambirejo yang terdapat di :
- a. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat lingkungan kelurahan/desa terdiri atas:
- a. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Blimbing terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Kadipiro terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
 - c. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Jetis terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
 - d. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Dawung terdapat di SWP I.C Blok I.C.1;
 - e. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Jambeyan terdapat di SWP I.D Blok I.D.1; dan
 - f. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Sukorejo terdapat di SWP I.D Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan Kawasan Agrpolitan Kecamatan Sambirejo digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer;
 - b. jalan lokal sekunder; dan
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. Jalan lingkungan sekunder;
 - e. terminal penumpang tipe C;
 - f. terminal barang;
 - g. halte; dan
 - h. jembatan.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Blimbing - Sambirejo, melalui SWP I.A Blok I.A.1; Blok I.A.2; dan Blok I.A.3.
 - b. Bonggo - Sambirejo, melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan Blok I.A.3.
 - c. Jambeyan - Sukorejo, melalui SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - d. Musuk - Jenawi (Kab. Karanganyar), melalui SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - e. Ngarum - Blimbing, melalui SWP I.A Blok I.A.1.
 - f. Pondok - Sambi, melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- g. Sambi – Bayanan, melalui:
 - 1) SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1.
 - h. Sambirejo – Musuk, melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1.
 - i. Sambirejo - Pondok, melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1.
 - j. Tawang – Sambi, melalui SWP I Blok I.C.2.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Blimbing – Bonggo, melalui SWP I.A Blok I.A.1.
 - b. Blimbing – Dawung, melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1.
 - c. Dawung - Sambi, melalui SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - d. Jambean – Batas Jawa Timur, melalui: SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - e. Jetis – Ngunut, melalui SWP I.B Blok I.B.2.
 - f. Musuk – Ngunut, melalui SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - g. Nangsri - Tawang Sari, melalui SWP I.C Blok I.C.1.
 - h. Sambi - Jambean, melalui:
 - 1) SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1.
 - i. Tunggul - Winong, melalui SWP I.D Blok I.D.1.
 - j. Winong – Jambean, melalui SWP I.D Blok I.D.1.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
- a. SWP I.A, Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1.
- (6) Terminal penumpang tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP I.C Blok I.C.2.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di wilayah perencanaan Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (10) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - c. Saluran Distribusi Lainnya; dan
 - d. Gardu Listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2.
- (4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik, yang melalui:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
 - b. Telepon *fixed line* berupa, yang melalui:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1.
 - b. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - c. Jaringan irigasi tersier, terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 3. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bendungan;
 - b. Pintu Air; dan
 - c. Prasarana Irigasi.
- (4) Bendungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1.
- (5) Pintu Air sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.2.
- (6) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1.

- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Unit produksi;
 - b. Unit distribusi;
 - c. Unit pelayanan; dan
 - d. Sumur pompa.
- (2) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bangunan penampung air, terdapat di :
 1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.2.
 - b. Jaringan transmisi air minum yang terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan I.D.2.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Hidran Umum, terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D Blok I.D.1.
 - b. Hidran Kebakaran, terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Sumur Pompa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.2
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di :
 - a. SWP I.B Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS)
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Jaringan drainase sekunder;
 - b. jaringan drainase tersier; dan
 - c. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi
 - c. Jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.A Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D Blok I.D.1.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di :
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di :
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- e. Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa sub zona Badan Air dengan kode BA, seluas 64,52 (enam puluh empat koma lima dua) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare berada di Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D seluas 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sub zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, seluas 193,40 (seratus sembilan puluh tiga koma empat nol) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 73,42 (tujuh puluh tiga koma empat dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 36,56 (tiga puluh enam koma lima enam) hektare berada di Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 62,07 (enam puluh dua koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D seluas 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 115,56 hektar (seratus lima belas koma lima enam) terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,61 (dua koma enam satu) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,16 (satu koma enam belas) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektare berada di Blok I.C.2.

- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 94,18 (sembilan puluh empat koma satu delapan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 32,65 (tiga puluh dua koma enam lima) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C seluas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 12,37 (dua belas koma tiga tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,59 (dua belas koma lima sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C seluas 2,44 (dua koma empat empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 6,18 (enam koma satu delapan) hektare, yang terdapat di :
 - a. SWP I.A seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.D seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa sub zona Cagar Budaya dengan kode CB, seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 6
Zona Konservasi

Pasal 22

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan Kode SM yaitu Suaka Margasatwa Gunung Tunggan seluas 101,81 (seratus satu koma delapan satu) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.B seluas 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.B.2; dan
- b. SWP I.D seluas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Perikanan dengan kode IK;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa sub-zona Badan Jalan dengan kode BJ, seluas 79,86 (tujuh puluh sembilan koma delapan enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 29,12 (dua puluh sembilan koma satu dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 10,10 (sepuluh koma satu nol) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 27,06 (dua puluh tujuh koma nol enam) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D seluas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 25

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Sub-Zona Perkebunan rakyat dengan kode KR, seluas 498,74 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh empat) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 9,88 (sembilan koma delapan delapan) hektare berada di Blok I.A.2;
- b. SWP I.B seluas 62,58 (enam puluh dua koma lima delapan) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 101,12 (seratus satu koma satu dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D seluas 325,16 (tiga ratus dua puluh lima koma satu enam) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 2.033,92 (dua ribu tiga puluh tiga koma sembilan dua) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.564,19 (seribu lima ratus enam puluh empat koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A 604,94 (enam ratus empat koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 285,07 (dua ratus delapan puluh lima koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C seluas 436,19 (empat ratus tiga puluh enam koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 237,99 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (2) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 398,07 (tiga sembilan puluh delapan koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 5,46 (lima koma empat enam) hektare berada di Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B seluas 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C seluas 105,69 (seratus lima koma enam sembilan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 187,10 (seratus delapan puluh tujuh koma satu nol) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 69,77 (enam puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.A.2;
 - b. SWP I.C seluas 37,53 (tiga puluh tujuh koma lima tiga) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D seluas 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektare berada di Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.C seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada di Blok I.D.2.

Paragraf 5
Zona Perikanan

Pasal 27

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.C seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada di Blok I.C.1; dan
- c. SWP I.D seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa sub-zona Pariwisata dengan kode W, seluas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare berada di Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare berada di Blok I.C.1; dan
- d. SWP I.D seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 1.342,86 (seribu tiga ratus empat puluh dua koma delapan enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 88,91 (delapan puluh delapan koma sembilan satu) hektare, terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 594,60 (lima ratus sembilan puluh empat koma enam nol) hektare, terdapat di :
 - a. SWP I.A seluas 311,57 (tiga ratus sebelas koma lima tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 125,84 (seratus dua puluh lima koma delapan empat) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 157,18 (seratus lima puluh tujuh koma satu delapan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 659,35 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga lima) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 75,26 (tujuh puluh lima koma dua enam) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 84,60 (delapan puluh empat koma enam nol) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - SWP I.C seluas 283,03 (dua ratus delapan puluh tiga koma nol tiga) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - SWP I.D seluas 216,47 (dua ratus enam belas koma empat tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas 20,64 (dua puluh koma enam empat) hektar, terdiri atas:
- Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada di Blok I.A.2.
 - SWP I.C seluas 6,66 (enam koma enam enam) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - SWP I.D seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 2,12 (dua koma nol satu dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berada di Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - SWP I.D seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada di Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - SWP I.C seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektare berada di Blok 1 I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - SWP I.D seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - SWP I.C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - SWP I.D seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 125,92 (seratus dua puluh lima koma sembilan dua) hektare, terdiri atas:
- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 32,37 (tiga puluh dua koma tiga tujuh) hektare, yang terdapat di :
- SWP I.A seluas 29,60 (dua puluh sembilan koma enam nol) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - SWP I.C seluas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 36,80 (tiga puluh enam koma delapan nol) hektare, terdapat di :
- SWP I.A seluas 34,33 (tiga puluh empat koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - SWP I.B seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare berada di Blok I.B.1.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 56,75 (lima puluh enam koma tujuh lima) hektare, terdapat di :
- SWP I.A seluas 13,12 (tiga belas koma satu dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 22,63 (dua puluh dua koma enam tiga) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - SWP I.C seluas 20,06 (dua puluh koma nol enam) hektare berada di Blok I.C.2; dan
 - SWP I.D seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.D.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa sub-zona Transportasi dengan kode TR, seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terdapat di SWP I.C Blok I.C.2.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare berupa:

- a. Polisi Sektor Sambirejo d yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2; dan
- b. Koramil 08 Sambirejo yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program pemanfaatan ruang prioritas

Bagian Kedua
KKKPR

Pasal 36

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. swasta; dan/atau
 - h. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Tahun 2024-2044, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2044.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa aturan dasar yang meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya; dan
 - c. Ketentuan teknis zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM;
 - e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8..
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;

- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 - f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona peternakan dengan kode P-4;
 - g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - i. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - j. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - k. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - l. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - m. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - n. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - o. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - p. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - q. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - s. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - t. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - u. Ketentuan kegiatan dan penggunaan Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (6) Ketentuan T sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona dari pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas);
- (7) Ketentuan B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin); dan
 - c. B3 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR)/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen dan peraturan lain yang berlaku.
- (10) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan dengan kode R meliputi:

- a. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (5) Luas kavling minimum sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - d. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
- a. Ketinggian bangunan maksimum; dan
 - b. GSB minimum.
- (2) GSB minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. GSB minimum terhadap jalan yaitu garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan, ditentukan paling sedikit dari as jalan berdasarkan kelas jalan;
 - b. GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai; dan
 - c. GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi.
- (3) GSB minimum terhadap jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan paling sedikit dari as jalan terdiri atas:
- a. GSB minimum terhadap lokal primer;
 - b. GSB minimum terhadap lokal sekunder;
 - c. GSB minimum terhadap lingkungan primer; dan
 - d. GSB minimum terhadap lingkungan sekunder.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;

- c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan disingkat LP2B;
 - b. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. Ketentuan khusus Kawasan Sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Ketentuan tata bangunan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a seluas 1.558,16 (seribu lima ratus lima puluh delapan koma satu enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 602,58 (enam ratus dua koma lima delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 283,84 (dua ratus delapan puluh tiga koma delapan empat) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C seluas 434,35 (empat ratus tiga puluh empat koma tiga lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 237,40 (dua ratus tiga puluh tujuh koma empat nol) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek

strategis nasional, dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. disusun rencana alih fungsi lahan; dan
3. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 45

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah tingkat tinggi;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor tingkat tinggi;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat sedang;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat rendah;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir tingkat tinggi; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat tinggi.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar
- b. pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah;
- c. wajib melakukan modifikasi pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan; dan
- d. menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diizinkan kegiatan dalam rangka perlindungan system hidrologi kawasan;
- b. diizinkan kegiatan hunian dengan syarat merupakan bangunan hunian eksisting;
- c. tidak diperbolehkan penebangan pohon tanpa aturan;
- d. diizinkan kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperkuat ketahanan lereng; dan/atau
- e. menghindari penggalian dan pemotongan lereng.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1; Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa; dan
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan industri.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud ayat (4) seluas hektar terdapat di:
- a. SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Aliran Lahar tingkat rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - 3. kegiatan evakuasi bencana;
 - 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini; dan/atau
 - 5. bencana alam geologi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan hunian dengan kepadatan sangat rendah;
 - 2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi; dan/atau
 - 3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini bencana alam geologi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
 - 2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
 - 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi; dan/atau
 - 4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan Sungai.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana aliran lahar tingkat rendah sebagaimana dimaksud ayat (8) terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;

- d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
- e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2) wajib membuat sumur biopori; dan
 - 3) KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (10) hektar terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat tinggi dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Kegiatan yang diijinkan pada Kawasan rawan bencana kebakaran hutan adalah kegiatan pencegahan kebakaran hutan, pemasangan rambu-rambu informasi ancaman atau rawan kebakaran hutan, dan kegiatan pengawasan dan pemantauan titik rawan kebakaran hutan pada musim kemarau, kegiatan sosialisasi pencegahan dini kebakaran, kegiatan patroli, dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan kebakaran;
 - b. Dilarang kegiatan membakar atau membuang puntung rokok, terutama saat musim kemarau atau berangin pada rumput, semak kering di lokasi yang rawan terbakar; dan
 - c. Dilarang membuka lahan Perkebunan dengan cara membakar hutan.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (12) hektar terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c seluas 5,38 (lima koma tiga delapan) terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan Desa Sambirejo berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. MTs Satu Atap Almanar berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 - c. Masjid Al-Fath berada di SWP I.A Blok I.A.3;
 - d. SDN 1 Musuk berada Di SWP I.B Blok I.B.1;
 - e. Gereja Kristen Bukit Zaitun berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 - f. Stadion Kepoh berada di SWP I.B Blok I.B.2;

- g. Kantor Desa Dawung berada di SWP I.C Blok I.C.1;
 - h. Masjid Al Munawaroh Jatiarum berada di SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - i. Masjid Al-Falah berada di SWP I.D Blok I.D.1
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Puskesmas Sambirejo, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang; dan
 - d. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan Gerakan tanah dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai dan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.

- (6) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan ketegalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam Ruang Bebas.
 - b. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud huruf a wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketegalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan:
 - 1) Bangunan yang memasuki Ruang Bebas;
 - 2) Bangunan pada tanah tapak menara/tiang dan/atau;
 - 3) Bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar;
 - 4) Melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 - 5) Menimbun atau menguruk tanah di bawah Ruang Bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan tanah; dan
 - 6) Menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
- (7) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hal yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi KKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.
- (9) Arahan disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (10) Arahan disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

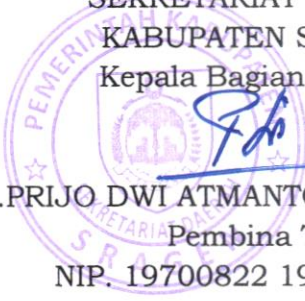
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap
HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 47

salinan sesuai dengan aslinya

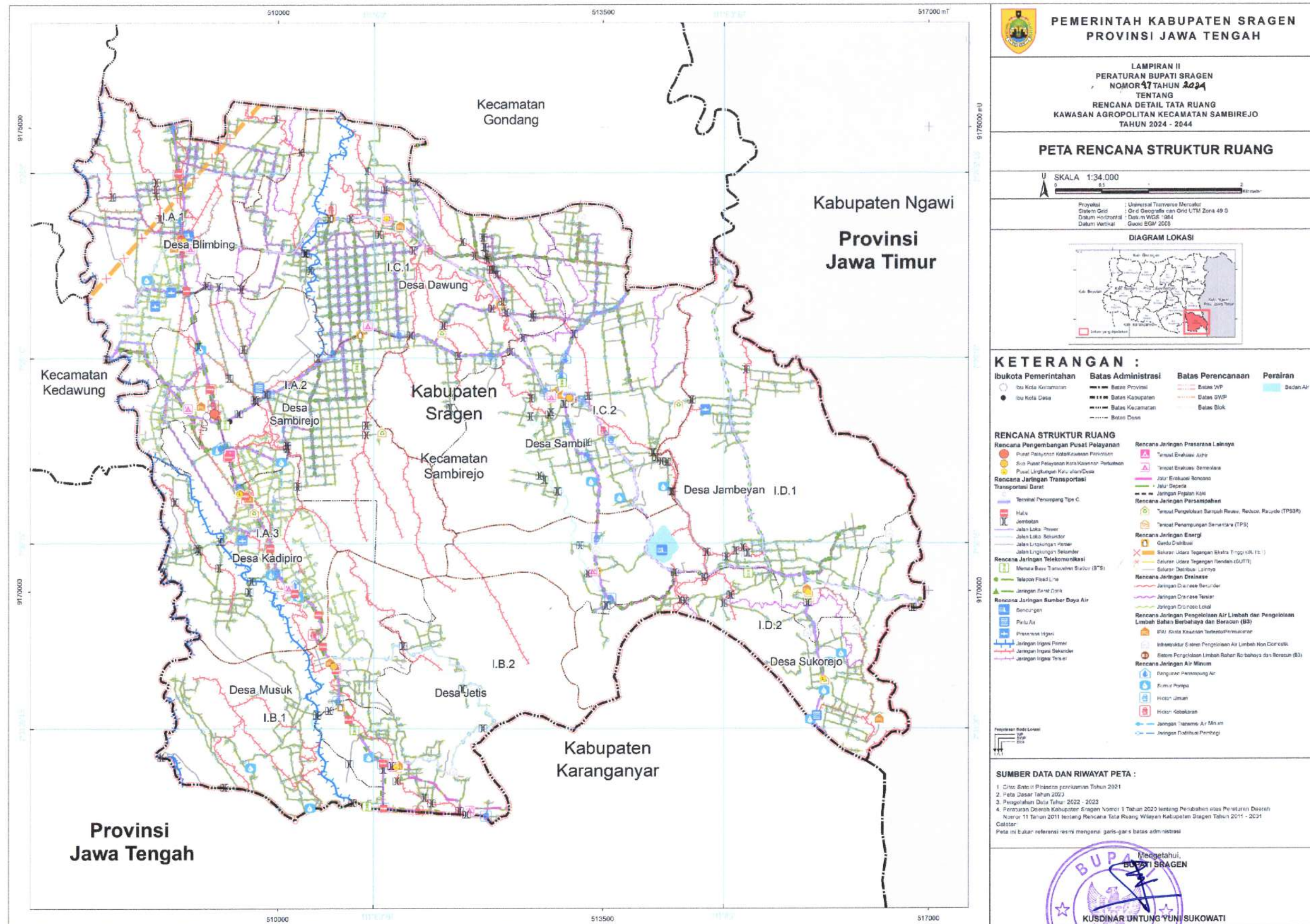
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007

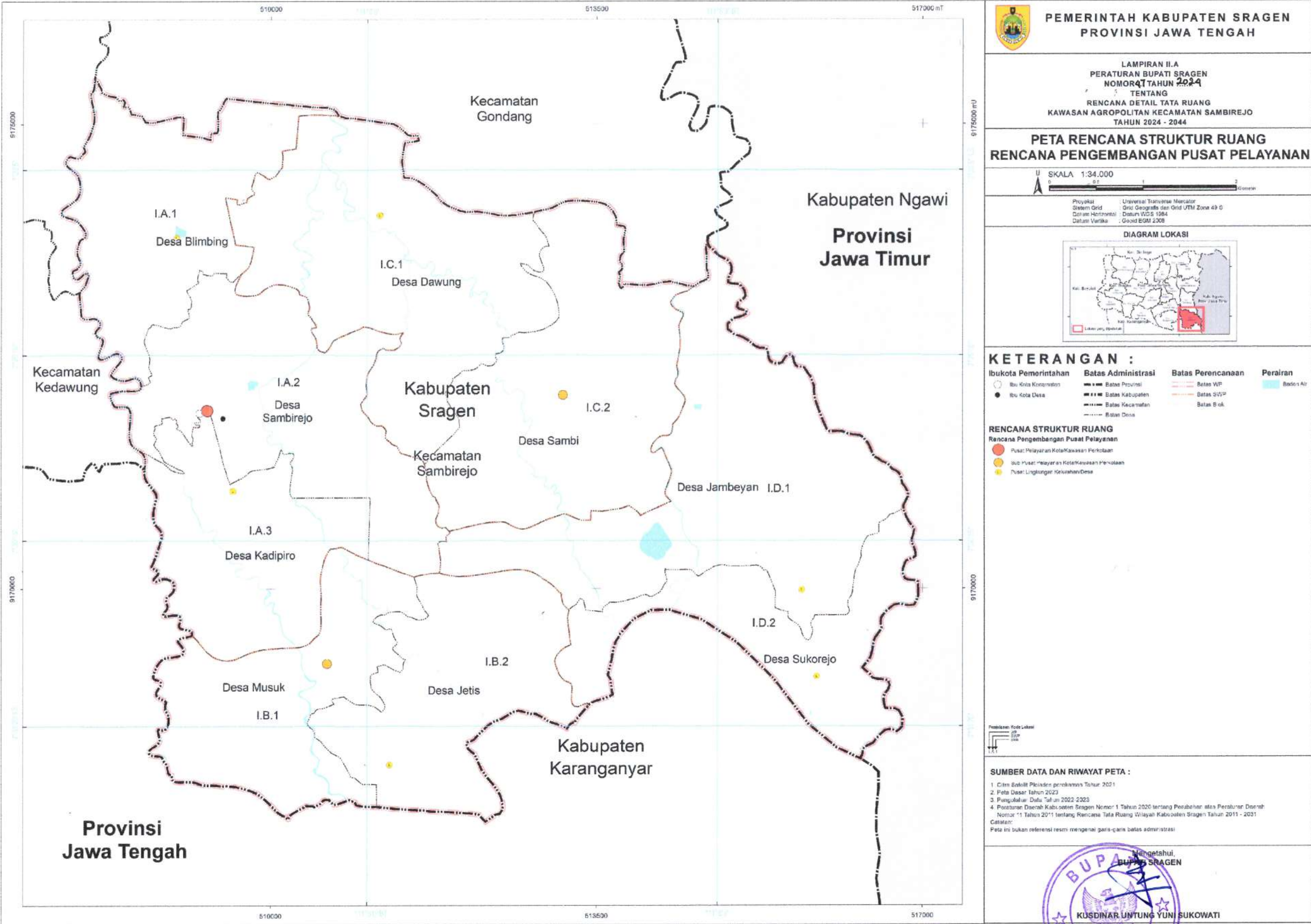
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



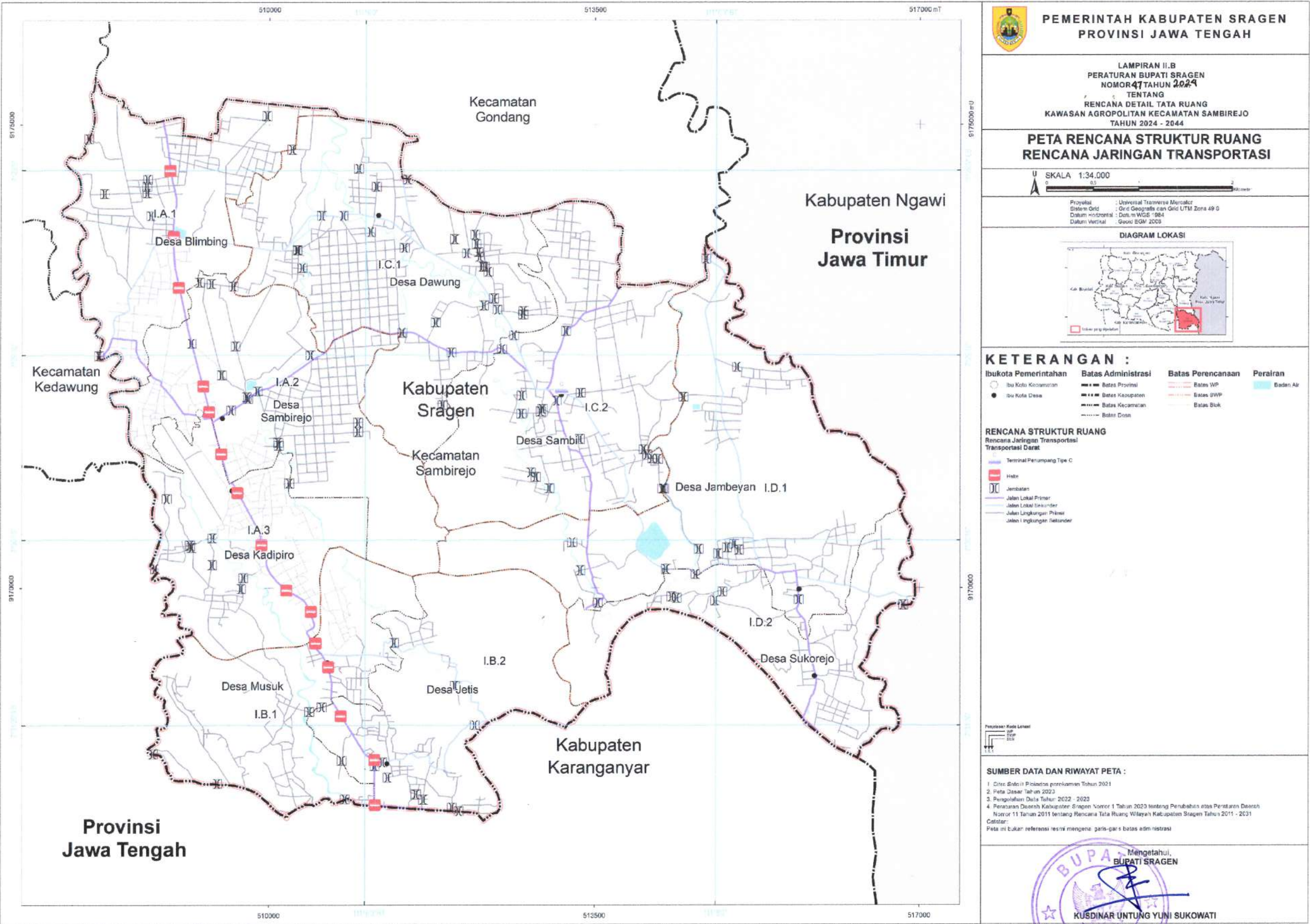
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 – 2044



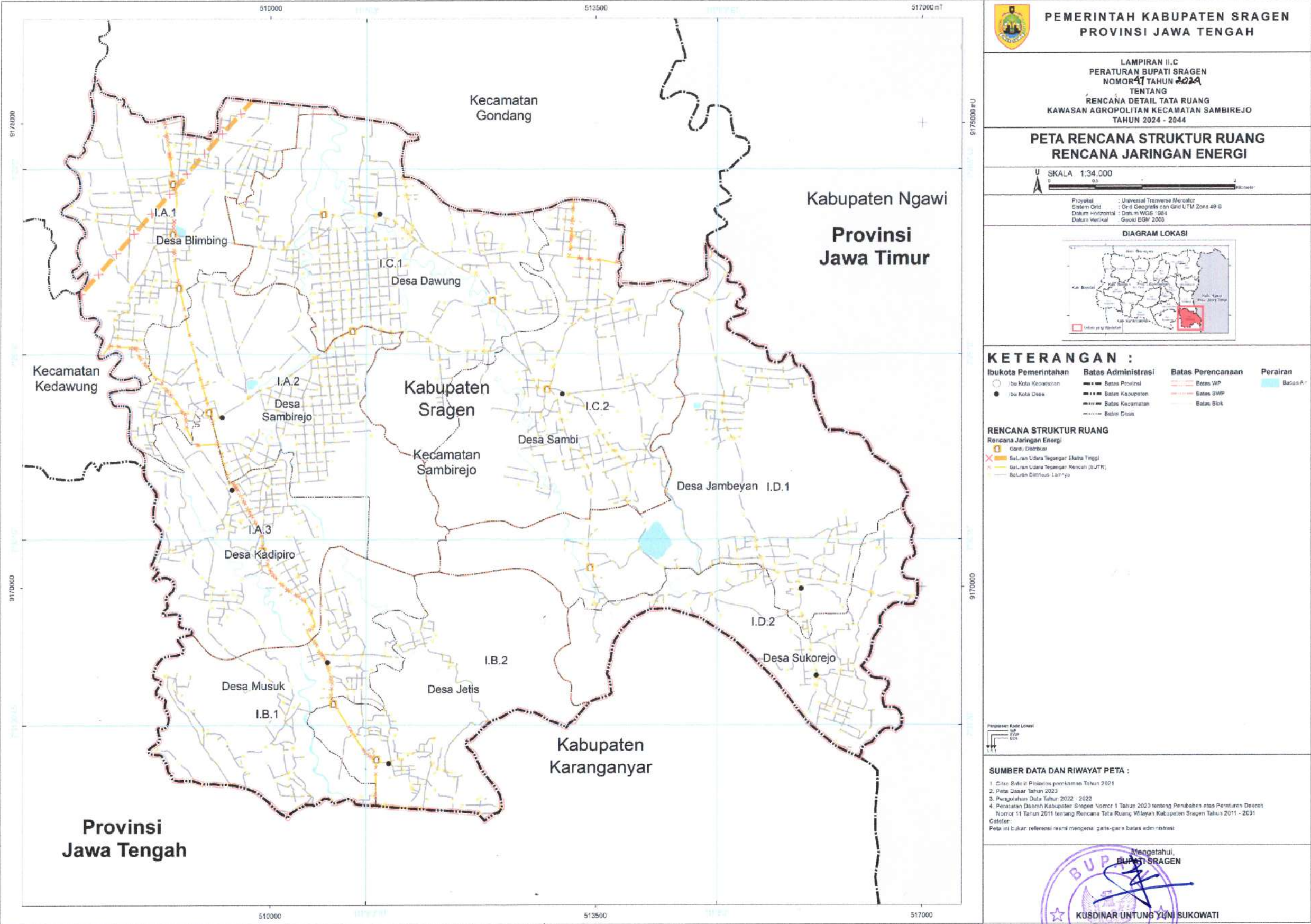
LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 – 2044



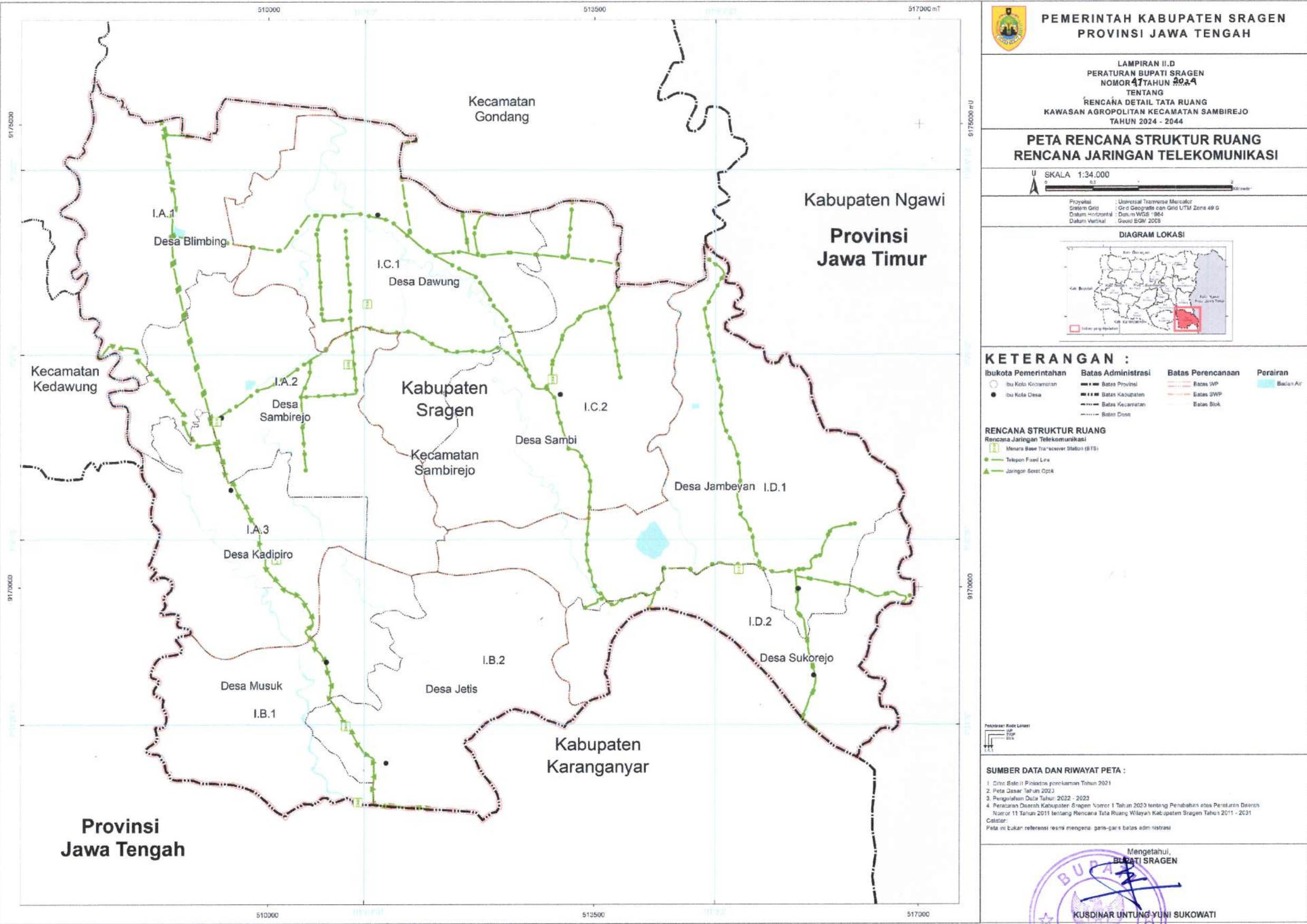
LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA 1:34.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 G
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol	Arti
●	Ibukota Pemerintahan
○	Ibu Kota Kecamatan
●	Ibu Kota Desa
—	Batas Provinsi
—	Batas Kabupaten
—	Batas Kecamatan
—	Batas Desa
—	Batas Perencanaan
—	Batas WPP
—	Batas SWP
—	Batas Blok
—	Perairan
—	Batikan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi**

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Telepon Fabel Line
- Jaringan Serat Optik

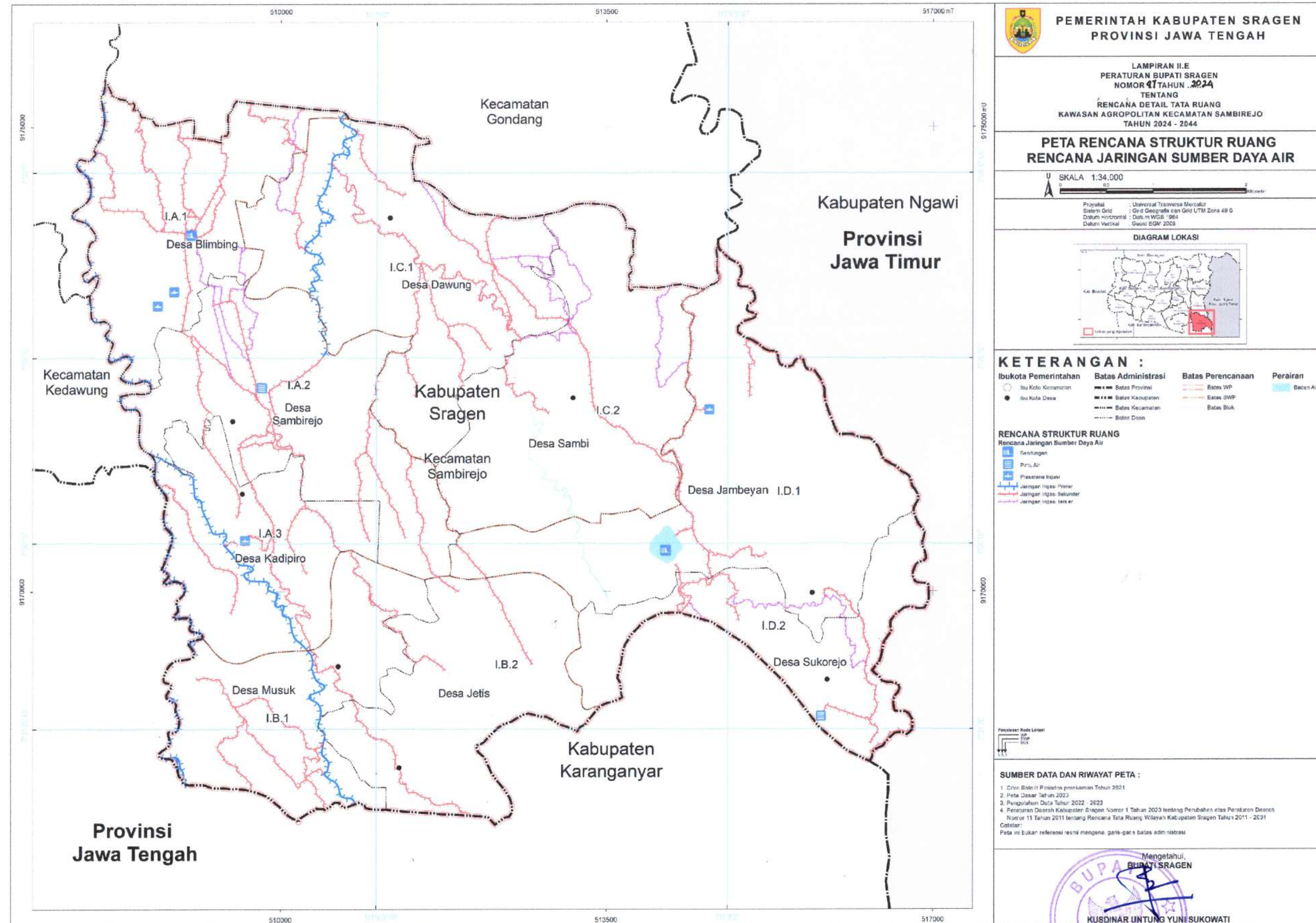
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Sate II Peta dasar peruntukan Tahun 2021
2. Peta Dasar Tahun 2021
3. Pengumuman Duta Tahun 2022 - 2023
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

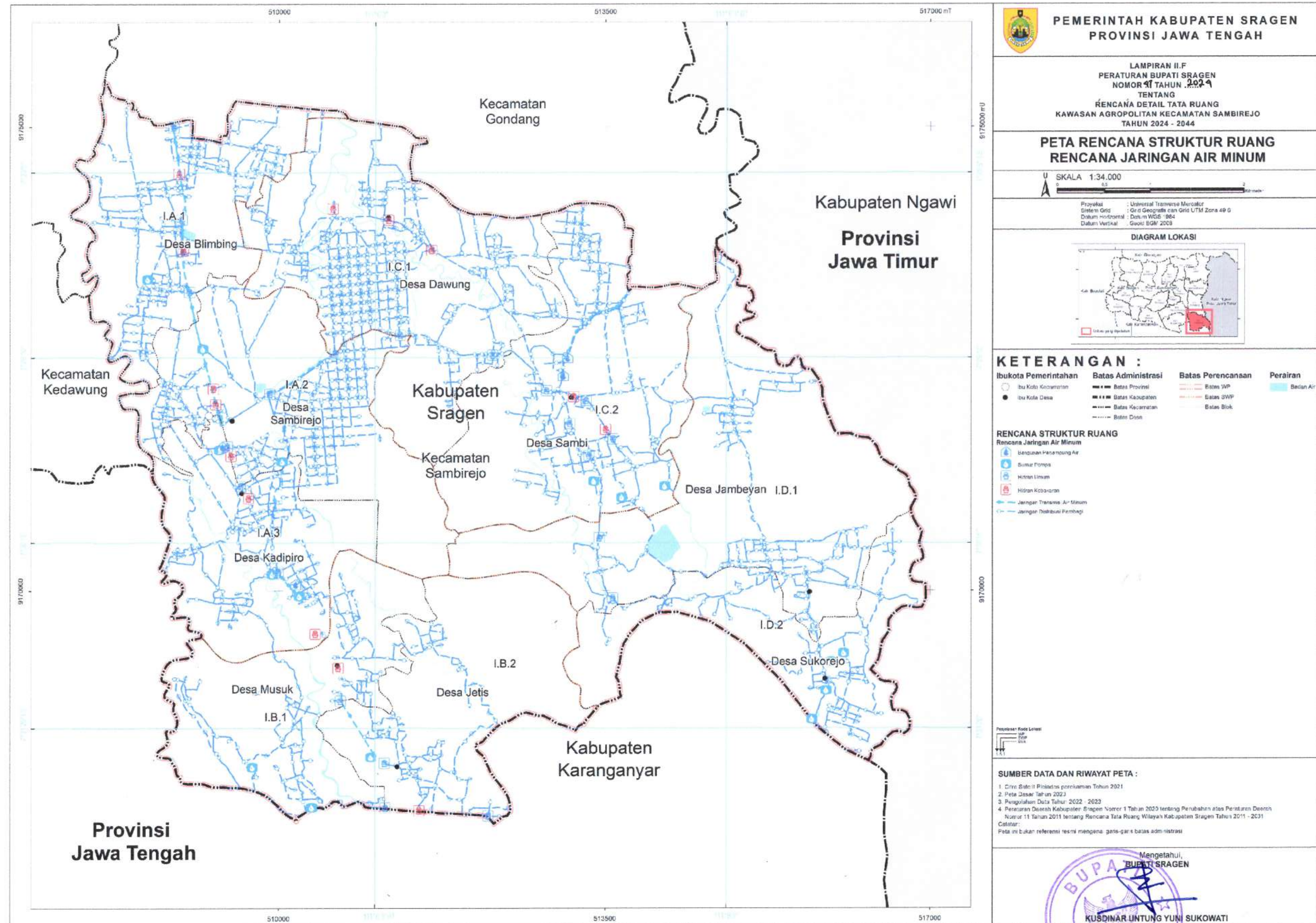
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

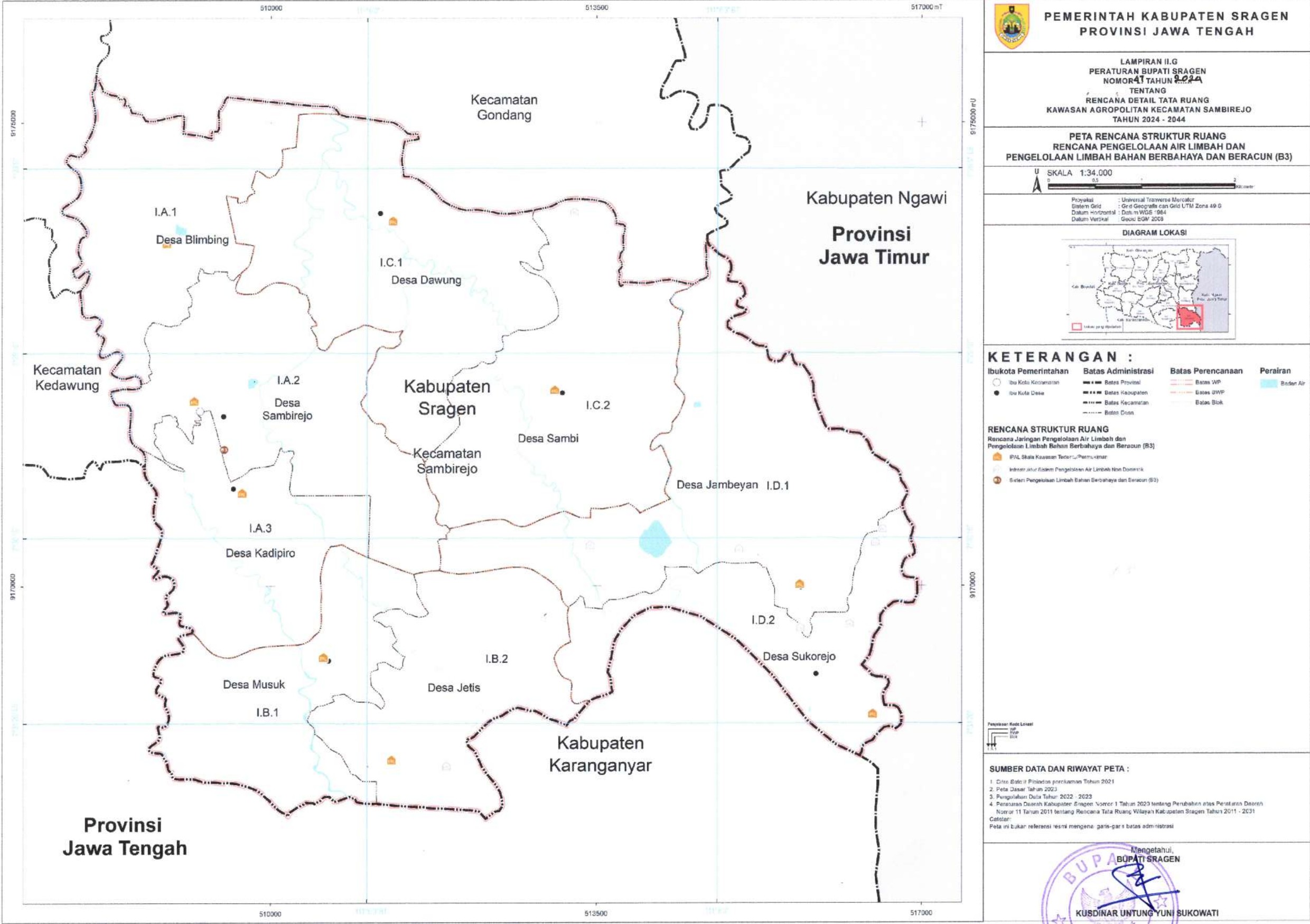
LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



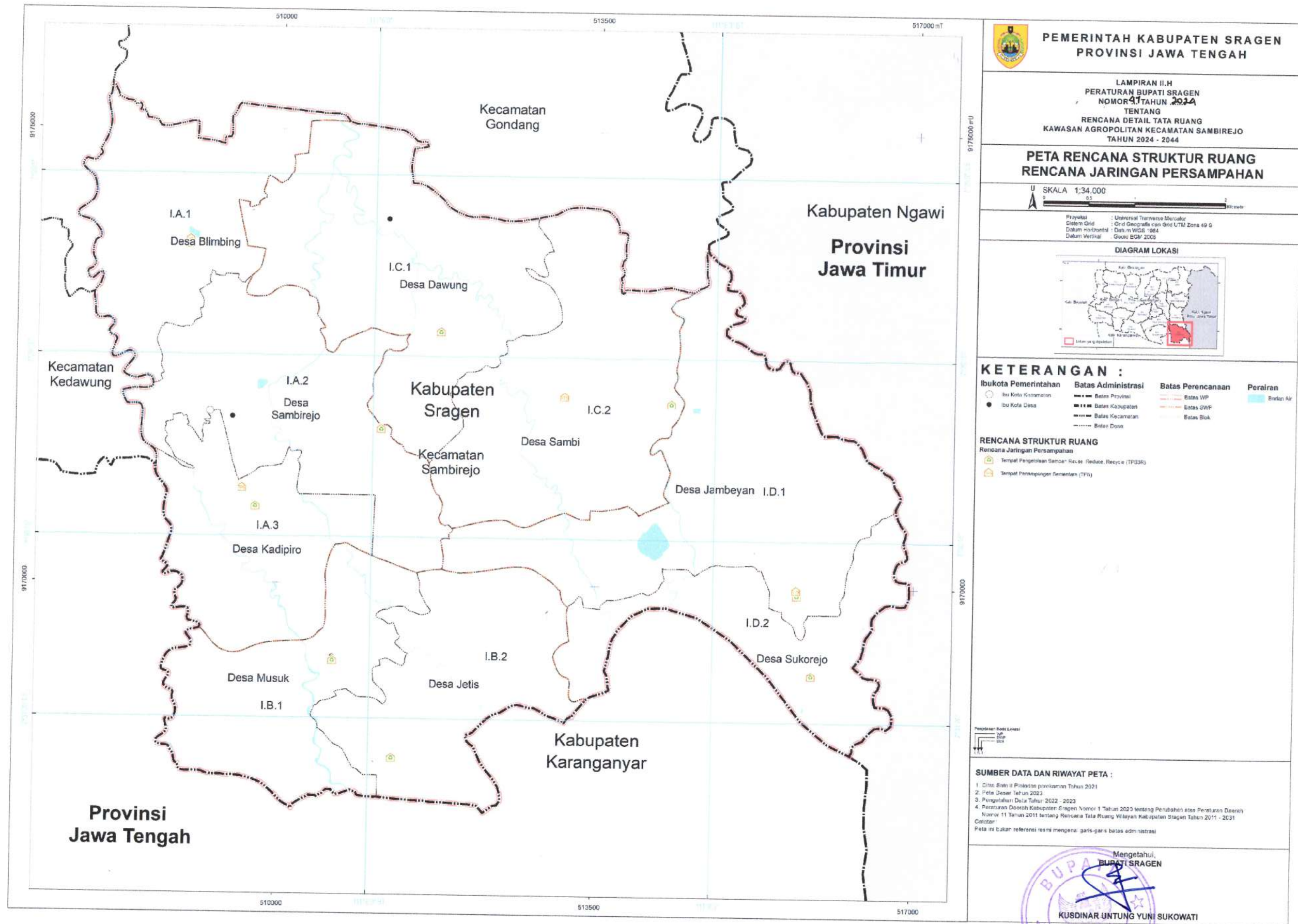
LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR **41** TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



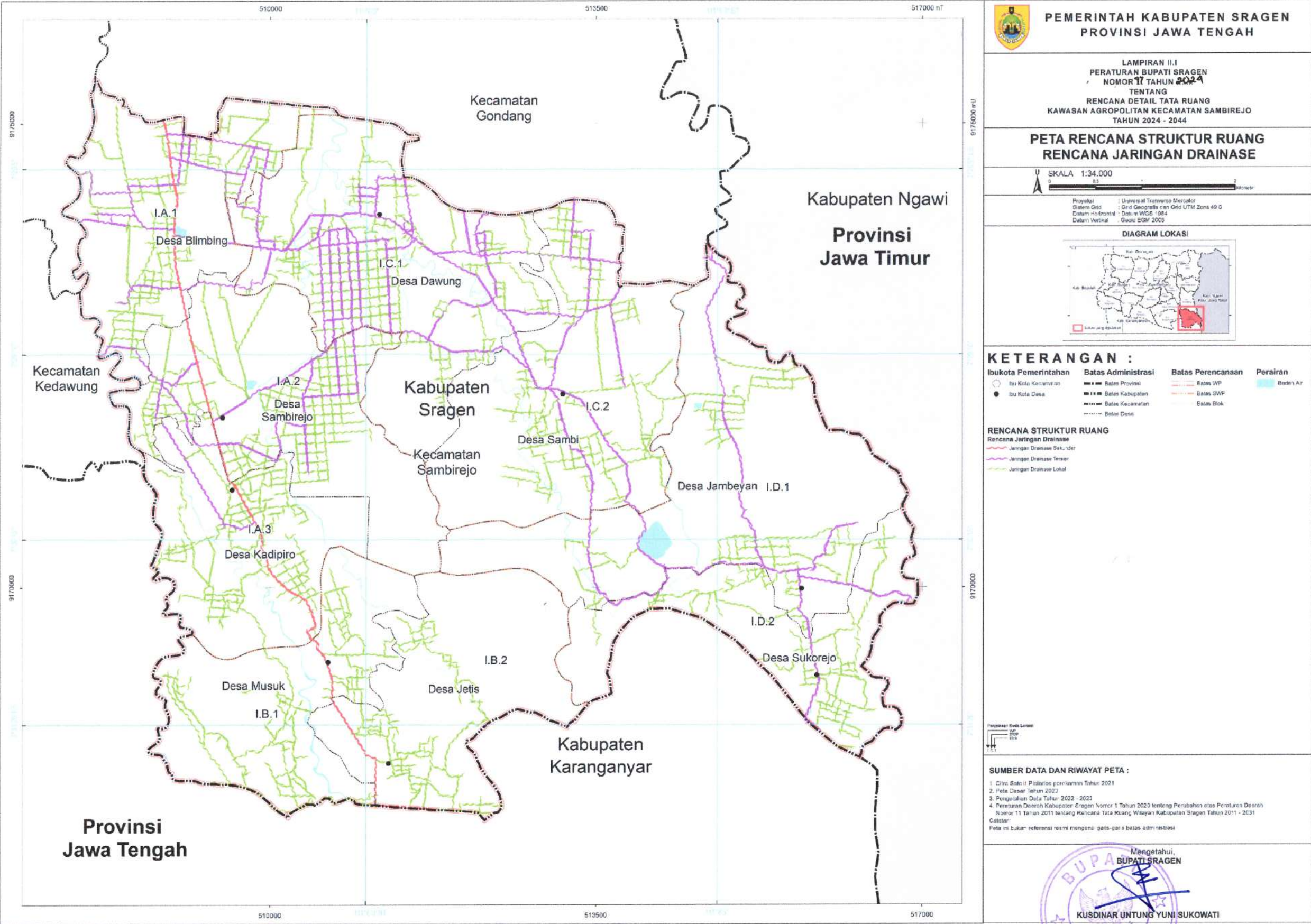
LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



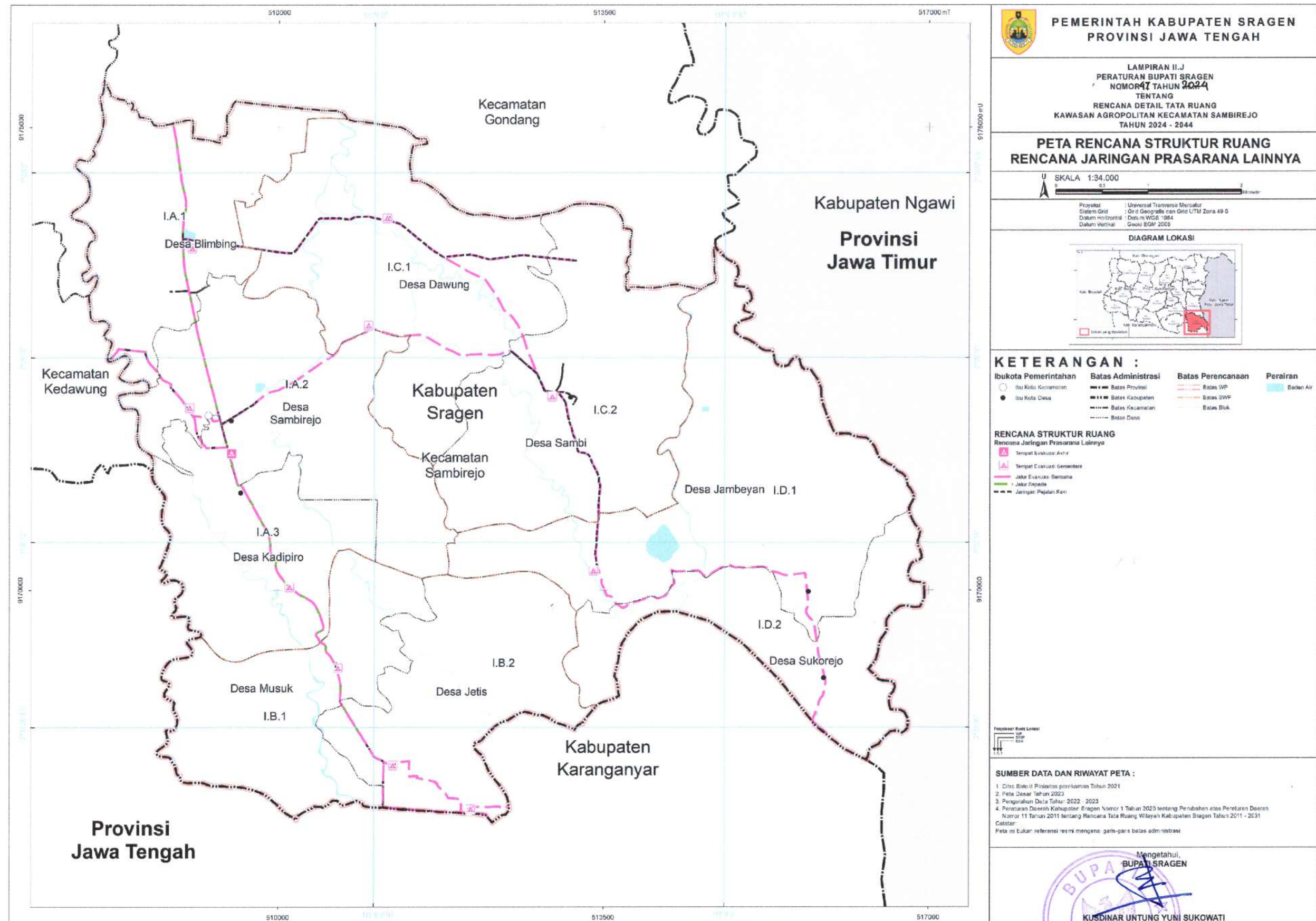
LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024-2044



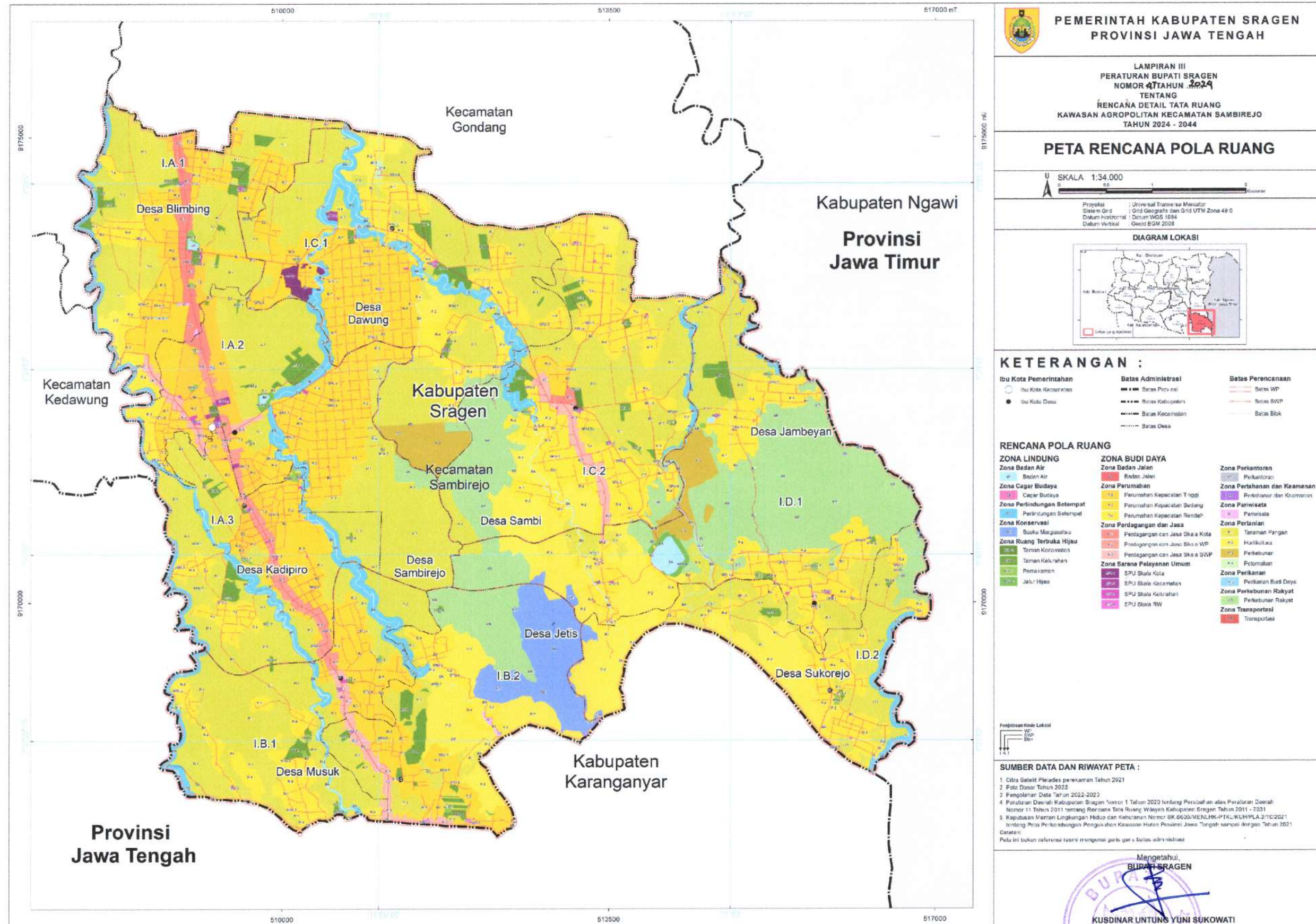
LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
A.1.a	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan pusat permukiman skala kota											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
													membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.1.b	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Sub Pusat Pelayanan Kota	- SWP I.B Blok I.B.1; dan - SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.1.c	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa												
	Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa : a. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Blimbing b. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Dawung c. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Jambeyan d. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Kadipiro e. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Jetis f. Pusat lingkungan Kelurahan/Desa Sukorejo	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2 - SWP I.C Blok I.C.1 - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.2	Rencana Jaringan Transportasi												
A.2.1	Jalan Lokal Primer												
1	Penetapan Peningkatan Fungsi Jalan Lingkungan menjadi jalan Lokal Primer pada ruas jalan:												
	Jambean - Sukorejo	- SWP I.D Blok I.D.1; dan - SWP I.D Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	Sambi - Bayanan	- SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	Sambirejo - Pondok	- SWP I.A Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
2	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lokal Primer pada ruas jalan :												
	Blimbing - Sambirejo	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	Bonggo - Sambirejo	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan Blok I.A.3.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	Jambean - Sukorejo	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	Musuk - Jenawi (Kab. Karanganyar)	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
	▪ Ngarum – Blimbing	▪ SWP I.A Blok I.A.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Pondok – Sambi	▪ SWP I.A Blok I.A.2; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Sambi - Bayanan	▪ SWP I.C Blok I.C.2; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Sambirejo – Musuk	▪ SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Sambirejo - Pondok	▪ SWP Blok I.A Blok I.A.2; dan ▪ SWP Blok I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Tawang - Sambi	▪ SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.2.2	Jalan Lokal Sekunder												
	• Rekonstruksi jalan Jambean - Batas Jawa Timur	▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	• Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder pada ruas jalan :												
	▪ Blimbing – Bonggo	▪ SWP I.A Blok I.A.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Blimbing – Dawung	▪ SWP I.A Blok I.A.1; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Dawung – Sambi	▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Jetis – Ngunut	▪ SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Musuk – Ngunut	▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Nangsri - Tawangsari	▪ SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Sambi - Jambean	▪ SWP I.C Blok I.C.2; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Tunggul - Winong	▪ SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
	▪ Winong – Jambean	▪ SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.2.3	Jalan Lingkungan Primer												
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Primer :	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum,Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
A.2.4	Jalan Lingkungan Sekunder												
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Sekunder	▪ SWP I.A, Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum,Pemerintah Desa, Pemerintah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		▪ SWP I.B Blok I.B.1.											Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
A.2.5	Terminal Penumpang Tipe C												
	Peningkatan, Pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Tipe Penumpang C	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
A.2.6	Terminal Barang												
	• Penyusunan Dokumen Kelayakan Terminal Barang	Wilayah perencanaan Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
	• Pembangunan Terminal Barang	Wilayah perencanaan Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
	• Peningkatan, pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Barang	Wilayah perencanaan Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
	Pengembangan Rute Trayek Angkutan Perdesaan Sambi-Jambeyan-Sukorejo												
	• Kajian kelayakan trayek	Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
	• Pengembangan trayek angkutan umum perdesaan Sambi-Jambyean-Sukorejo	Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
A.2.7	Halte												
	Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan halte	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan
A.2.8	Jembatan												
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jembatan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.3	Rencana Jaringan Energi												
A.3.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)												
	1. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik SUTET	▪ SWP I.A Blok I.A.1										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
	2. Menetapkan sempadan SUTET	SWP I.A Blok I.A.1										-APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
	3. Pembatasan kegiatan disekitar sempadan SUTET	SWP I.A Blok I.A.1										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
	4. Penyediaan distribusi tenaga listrik	SWP I.A Blok I.A.1										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.3.2	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)												
	1. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik SUTR	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
	2. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan distribusi lainnya	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
	3. Penyediaan distribusi tenaga listrik SUTR	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
	4. Penyediaan lampu penerangan jalan yang arahnya ditempatkan pada daerah milik jalan pada sisi jalur hijau agar tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.3.3	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Listrik Saluran Distribusi Lainnya	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.3.4	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu distribusi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.3.5	Peningkatan pemenuhan pelayanan jaringan listrik untuk kebutuhan domestik dan nondomestik; dan	Seluruh SWP										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.3.6	Kajian penyusunan masterplan/DED jaringan energi	Seluruh SWP										APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT. PLN (Persero)
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
A.4.1	Jaringan Tetap												
1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.										APBN, BUMN, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom, Swasta
2	Pengembangan dan Pemeliharaan telepon <i>fixed line</i>	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, BUMN, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom, Swasta
A.4.2	Jaringan Bergerak Seluler												
a.	Pengembangan dan peningkatan penggunaan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.2.										Swasta	Swasta
b.	Peningkatan dan pengembangan layanan internet (<i>Hot Spot Area</i>) dilokasi strategis	- SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.2.										APBD Kab, swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
c.	Pengembangan menara BTS bersama sesuai dengan zonasi rencana <i>cell plan</i> yang telah ditetapkan	- SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.2.										APBD Kab, swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
d.	Peningkatan pelayanan jaringan bergerak seluler pada pusat-pusat strategis kawasan baik untuk telekomunikasi telepon maupun internet	Seluruh SWP										APBD Kab, swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
e.	Pembangunan Menara BTS	Seluruh SWP										APBD Kab, swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
f.	Kajian penyusunan masterplan jaringan telokomunikasi	Seluruh SWP										APBD Kab, APBN	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom
A.5	Rencana Jaringan Sumber daya Air												
A.5.1	Sistem Jaringan Irigasi												
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi primer	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;										APBN, APBD Prov , APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Provisni yang membidangi sumber daya air,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
		SWP I.C Blok I.C.1											Pemerintah Daerah kabupaten yang mmbidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memndidngi pertanian dan ketahanan pangan
	Normalisasi jaringan irigasi sekunder secara berkala	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBN, APBD Prov , APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Provisni yang membidangi sumber daya air, Pemerintah Daerah kabupaten yang mmbidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memndidngi pertanian dan ketahanan pangan
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi sekunder	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBN, APBD Prov , APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Provisni yang membidangi sumber daya air, Pemerintah Daerah kabupaten yang mmbidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memndidngi pertanian dan ketahanan pangan
	Normalisasi jaringan irigasi sekunder secara berkala	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBN, APBD Prov , APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Provisni yang membidangi sumber daya air, Pemerintah Daerah kabupaten yang mmbidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memndidngi pertanian dan ketahanan pangan
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa
	Normalisasi jaringan irigasi tersier secara berkala	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa
A.5.2	Bangunan Sumber Daya Air												
a.	Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan	- SWP I.A Blok I.A.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
b.	Pembangunan dan Pemeliharaan Pintu Air	- SWP I.A Blok I.A.2; dan - SWP I.D Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
c.	Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3; - SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
d.	Peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan tentang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
e.	<i>Pembinaan program ProKlim (Kampung Iklim)</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
f.	<i>Pengendalian perijinan sumur dalam pertanian</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
g.	Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
h.	<i>Pengembangan sumur resapan</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2;										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
i.	Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Irigasi	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah di Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
A.6	Rencana Jaringan Air Minum												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
A.6.1	Unit Produksi												
a	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Bangunan penampung air	- SWP I.A Blok I.A.3; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
b	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.6.2	Unit Distribusi												
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi PDAM	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2. - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.6.3	Unit Pelayanan												
a	Pembangunan hidran umum	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1.										APBD Kab, BUMD, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
b	Pembangunan hidran kebakaran	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBD Kab, BUMD, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
A.6.4	Sumur Pompa												
a.	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pembangunan sumber air berupa sumur pompa	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.2.										APBD Kab, BUMD, Swasta	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
b.	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
c.	Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													membidangi perumahan dan tata ruang
d.	Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum	Seluruh SWP										APBD	Perumda Air Minum Kab Sragen
e.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
f.	Konservasi sumber air baku	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab	Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
g.	Pemanfaatan Sumber mata air secara berkelanjutan	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
h.	Pengendalian pengambilan air tanah dalam melalui perijinan dan retribusi	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Perumda Air Minum Kab Sragen, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
i.	<i>Pelestarian mata air melalui kegiatan reboisasi kawasan sekitar sumber air</i>	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
j.	<i>Pengujian kualitas air secara berkala pada sumur-sumur milik masyarakat</i>	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
k.	<i>Pengembangan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun sebagai upaya dalam usaha pemanenan air hujan.</i>	Seluruh SWP										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
l.	Kajian penyusunan masterplan jaringan Air Minum	Seluruh SWP										APBD Kab Sragen, BUMD, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda air minum kab sragen
A.7	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
A.7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
a.	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Kabupaten yang membidangi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Swasta
b.	<i>Penanaman pohon penyerap bau di sekitar lokasi pengelolaan limbah</i>	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Kabupaten yang membidangi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Swasta
c.	<i>Pengelolaan limbah peternakan dengan system pertanian sebagai sumber pupuk organik</i>	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Kabupaten yang membidangi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Swasta
d.	<i>Pemanfaatan limbah cair peternakan sebagai sumber energi terbarukan berupa “Biogas”.</i>	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Kabupaten yang membidangi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Swasta
e.	<i>Pembangunan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan standar</i>	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Kabupaten yang membidangi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Swasta
A.7.2	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat												
a.	Pengembangan dan pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Bina Marga dan Cipta Karya , Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Masyarakat, Swasta
b.	Pemeliharaan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Masyarakat, Swasta
c.	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBD Kab, Masyarakat,	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
		SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											
d.	Pembentukan KSM pengelolaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat,	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat
e.	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat
f.	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah kepada masyarakat Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat
g.	Penyediaan IPAL komunal atau terpusat untuk limbah domestik untuk zona perumahan.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat
h.	Penyediaan IPAL Komunal untuk industri rumah tangga/ kecil atau mikro pada kawasan perumahan.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kesehatan, masyarakat
A.7.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
a.	Pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab, KSM	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
b.	Pengolahan limbah B3 yang ramah lingkungan dengan metode stabilisasi	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab, KSM	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
c.	Pemenuhan dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL – UPL	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab, KSM	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
d.	<i>Pengelolaan fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku.</i>	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab, KSM	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
e.	Penyusunan masterplan Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh SWP										APBD	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.8	Rencana Jaringan Persampahan												
A.8.1	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)												
a.	Sosisliasai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pemahanan larangan membuang sampah ke sungai	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
b.	Perencanaan pengembangan pelayanan pengangkutan sampah kabupaten untuk melayani WP Agropolitan Sambirejo	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
c.	Pengembangan dan pembentukan pengelolaan sampah skala Rumah Tangga melalui Bank Sampah	Seluruh SWP										APBD Kab, APBDes Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Masyarakat
d.	Perencanaan Pembangunan TPS3R	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta,, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
e.	<i>Pembentukan kelembagaan KSM dan pelatihan managerial penyelenggaraan TPS3R</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
f.	<i>Pengembangan RTH buffer kawasan TPS3R</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
g.	<i>Pengembangan teknologi pengolahan sampah</i>	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;										APBD Kab, APBDes, Swasta,	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										Masyarakat	
h.	Pembentukan Perdes terkait pengelolaan sampah desa	Seluruh SWP										APBD Des	Pemerintah Desa
A.8.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)												
a.	Perencanaan dan Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1.										APBD Kab, APBDes Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Masyarakat
b.	Penyusunan masterplan persampahan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.9	Rencana Jaringan Drainase												
A.9.1	Jaringan Drainase Sekunder												
a.	Pembangunan jaringan drainase sekunder	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
b.	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.9.2	Jaringan Drainase Tersier												
a.	Pembangunan jaringan drainase tersier	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
b.	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.9.3	Jaringan Drainase Lokal												
a.	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase lokal	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
b.	Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Masyarakat
c.	<i>Pembuatan lubang biopori</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Masyarakat
d.	<i>Penyusunan dokumen masterplan drainase</i>	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana												
	Pengembangan jalur evakuasi bencana berada di koridor jalan penghubung Agropolitan Sambirejo	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab APBDes	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan, Pemerintah Desa
A.10.2	Tempat Evakuasi												
1	Penempatan dan pemberian informasi mitigasi pendana, serta pemasangan rambu-rambu evakuasi Tempat Evakuasi Akhir pada sarana pelayanan umum	SWP I.A Blok I.A.2										APBD Kab APBDes	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan, Pemerintah Desa
2	Penempatan Tempat Evakuasi Sementara direncanakan berada pada bangunan pada zona perkantoran dan sarana pelayanan umum	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.A Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab APBDes	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Dinas Kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan, Pemerintah Desa
A.10.3	Jalur Sepeda												
	Pembangunan dan pemeliharaan Jalur Sepeda	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.10.4	Jalur Pejalan Kaki												
1	Pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki ruas jalan Raya Sragen - Balong	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
		▪ SWP I.D Blok I.D.1.											
2	Pengembangan jalur pejalan kaki di sekitar SUB Terminal Agribisnis yaitu di ruas jalan Sambu – Jambayan	Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
B.1	Zona Lindung												
B.1.1	Zona Badan Air (BA)												
1	Konservasi badan air dan ekosistemnya, melalui: - Perlindungan badan air dengan baku mutu air kelas satu - Perlindungan ekosistem di sekitar badan air dengan baku mutu air kelas satu	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
2	Perlindungan badan air dan ekosistem di sekitar badan air	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
3	Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas sumber air (sungai), dengan tidak membuang air limbah dan sampah langsung ke badan sungai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
4	Pencadangan badan air dan ekosistemnya	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
5	Peningkatan titik uji kualitas air sungai secara berkala.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
6	Normalisasi sungai, danau/embung/waduk.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum	
7	Pengelolaan air limbah dengan saluran terpisah sebelum dialirkan ke badan air	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum	
B.1.2	Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)												
1	Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang Kab, Swasta	
2	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta	
3	Monitoring dan pengawasan pengendalian fungsi sempadan sungai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
4	Pembatasan dan pencegahan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sempadan Sungai dan waduk	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
7	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai melalui Penerapan ketentuan mengenai batasan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas sempadan waduk	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
8	Pengaturan pemanfaatan sumber air sebagai sumber air minum, irigasi, pariwisata dan lainnya sehingga tidak mengurangi kualitas tata air	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
9	Pembuatan sistem saluran dalam mendukung pemanfaatan air minum dan/atau irigasi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMD Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
		SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Perumda Air Minum. Swasta
10	Penanaman pohon penahan erosi di Sempadan Sungai dan Waduk *)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
11	Penertiban bangunan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lindung.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
12	Pembatasan dalam pengembangan jalan lokal, lingkungan dan inspeksi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
13	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Waduk	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
14	Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
15	Pemberian disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
16	Peningkatan peran masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang sumber daya air, bidang pertanahan dan tata ruang
B.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
1	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)												
	Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan RTH	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pembangunan RTH Taman Kecamatan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pemeliharaan RTH Taman kecamatan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
													ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Penyediaan sarana pengelolaan persampahan disetiap lokasi pengembangan taman*)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
2	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)												
	▪ Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan RTH	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	▪ Pembangunan RTH Taman Kelurahan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	▪ Pemeliharaan RTH Taman Kelurahan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Penyediaan sarana pengelolaan persampahan disetiap lokasi pengembangan taman</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
3	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)												
	▪ Pengembangan dan peningkatan RTH Pemakaman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengadaan lahan RTH Pemakaman	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;										APBD Kab, APBDes,	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										Swasta, Masyarakat	dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	Pembangunan RTH Pemakaman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
	Pemeliharaan Pemakaman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
4	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)												
	Pengembangan jalur hijau pada sempadan SUTET	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP D Blok I.D.1										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
	Pemeliharaan Jalur Hijau	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP D Blok I.D.1										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan dan tata ruang
	Penyusunan masterplan ruang terbuka hijau	Wilayah perencanaan Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo										APBD	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
5	Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1%	Seluruh SWP										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
6	Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1,24%	Seluruh SWP										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
7	• Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1 %	Seluruh SWP										APBD, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
B.1.4	Zona Cagar Budaya (CB)												
1	Sosialisasi keberadaan cagar budaya serta pemanfaatannya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
2	Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
3	Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
4	Pengembangan wisata dan promosi wisata minat khusus pada Zona Cagar Budaya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
5	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Situs Cagar Budaya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
6	Pembatasan kegiatan yang berpotensi merubah fungsi cagar budaya	SWP I.B Blok I.B.2										APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
B.1.5	Zona Konservasi (KS)												
1	Sub-Zona Suaka Margasatwa (SM)												
	▪ Pengendalian pemanfaatan lahan disekitar Taman Suaka Alam	• SWP I.B Blok I.B.2; dan • SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Kementerian/Lembaga yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup
	▪ Mitigasi konflik antar kawasan Taman Suaka Alam dengan sekitarnya	• SWP I.B Blok I.B.2; dan										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Kementerian/Lembaga yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
		SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.											membidangi lingkungan hidup,, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup
	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian kawasan sekitar Taman Suaka Alam	- SWP I.B Blok I.B.2; dan - SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Kementerian/Lembaga yang membidangi lingkungan hidup,, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup
	Pengamanan kawasan bersama masyarakat	- SWP I.B Blok I.B.2; dan - SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Kementerian/Lembaga yang membidangi lingkungan hidup,, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup
	Peningkatan flora dan satwa Taman Suaka Alam	- SWP I.B Blok I.B.2; dan - SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Kementerian/Lembaga yang membidangi lingkungan hidup,, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Lingkungan Hidup
B.2	Zona Budi Daya												
B.2.A	Zona Badan Jalan (BJ)												
	Sub Zona Badan Jalan (BJ)												
1	Pemeliharaan rutin dan berkala badan jalan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
2	Pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas jalan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
3	Pengembangan jalur hijau jalan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
B.2.B	Zona Perkebunan Rakyat (KR)												
	Sub Zona Perkebunan Rakyat (KR)												
	Pemantapan batas rencana perkebunan rakyat	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;										APBN, APBD Prov, APBD Kab,	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan, Pemerintah Provinsi dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
		- SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan
	Mitigasi konflik antar kawasan perkebunan rakyat dengan kawasan sekitar	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab,	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan
	Peningkatan hasil produksi perkebunan rakyat	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab,	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan
B.2.C	Zona Pertanian												
1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)												
	Kajian studi LP2B	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Studi inventarisasi pemetaan LP2B	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penetapan LP2B	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sosialisasi peraturan LP2B	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
	▪Monitoring dan Evaluasi LP2B	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan ramah lingkungan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Pengembangan sarana dan jaringan pendukung pertanian	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	▪Pengendalian perkembangan permukiman perkotaan di sekitar lahan pertanian	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											
	Peningkatan fungsi dan cakupan layanan jaringan irigasi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam perwujudan kawasan agropolitan Sambirejo	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan produktivitas pertanian	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sosialisasi sistem pola tanam serempak	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan sistem pola tanam serempak	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Sub-Zona Hortikultura (P-2)												
	Pengembangan kegiatan pertanian tanaman hortikultura	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan pemasaran hasil pertanian hortikultura	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											
	Pengembangan pertanian ramah lingkungan (pengurangan pestisida)	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan produktivitas pertanian	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan agroindustri hasil olahan pertanian hortikulura	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian hortikultura	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Sub-Zona Perkebunan (P-3)												
	Pengembangan kegiatan pertanian tanaman perkebunan	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup, Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan wajib lingkungan hidup dan kehutanan, BUMN yang membidangi perkebunan negara
	Peningkatan produktivitas perkebunan	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup, Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan wajib lingkungan hidup dan kehutanan, BUMN yang membidangi perkebunan negara
	Peningkatan agroindustri hasil olahan perkebunan	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup, Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan wajib lingkungan hidup dan kehutanan, BUMN yang membidangi perkebunan negara

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
	▪ Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan perkebunan	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup, Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi urusan wajib lingkungan hidup dan kehutanan, BUMN yang membidangi perkebunan negara
4	Sub-Zona Peternakan (P-4)												
	▪ Pengembangan kegiatan peternakan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Peningkatan produktivitas peternakan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Peningkatan kelembagaan petani ternak (gapoktan dan kelompok tani ternak)	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Penyediaan sarana ternak kandang komunal	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Penyediaan sarana pengolahan limbah ternak	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Peningkatan pemanfaatan biogas peternakan sebagai sumber energi	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	▪ Pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	▪ Penanaman pohon penyerap bau	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	▪ Pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif (biogas)	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	▪ Pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber pupuk organik	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	▪ Pemanfaatan limbah pertanian (sisa daun, buah dll) sebagai sumber alternatif pakan ternak.	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
B.2.D	Zona Perikanan												
	Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)												
	▪ Peningkatan penyuluhan dalam Pembangunan kegiatan budidaya perikanan.	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok 1.D.1.									APBD	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum	
	▪ Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pada subzona perikanan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok 1.D.1.									APBD	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum	
	▪ Peningkatan sarana prasarana penunjang budidaya perikanan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok 1.D.1.									APBD	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perikanan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum	
B.2.E	Zona Pariwisata												
	Sub-Zona Pariwisata (W)												
1	Pengembangan wisata secara terpadu (paket wisata) di WP Agropolitan Sambirejo	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat	
2	Promosi pariwisata dengan <i>branding</i> dan iklan di masyarakat	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat	
3	Penataan kawasan wisata dan penyediaan home stay	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat	
4	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas obyek wisata secara berkelanjutan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat	
5	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dan air limbah dikawasan wisata.	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat	
6	Pengembangan RTH dengan komobinasi tanaman hias dan tanaman pangan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan									APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan,	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
		SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
7	Pembuatan sumur-sumur resapan pada kawasan wisata	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
8	Pembuatan ecodrainage pada lokasi-lokasi wisata	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
9	Pengembangan pariwisata berbasis ekologi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
10	Pembangunan IPAL komunal atau terpusat di kawasan pariwisata	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
11	Pengembangan wisata dengan sistem recycle air yang dimanfaatkan untuk flushing atau untuk siram-siram tanaman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
12	Pemanfaatan sumber energi alternatif pada aktivitas wisata (Panas Bumi, Solar Panel, Biogas)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan										APBN, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
		SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
13	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona pariwisata sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
B.2.F	Zona Perumahan											
1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)											
	Peningkatan akses jalan penghubung antar lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Peningkatan SPU Perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan permukiman kumuh	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
												Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Relokasi rumah yang berada pada zona lindung	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pengembangan perumahan layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pembangunan sumur resapan dan biopori di zona perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pemantauan uji kualitas air pada zona pengembangan perumahan.	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penerapan <i>urban farming</i> di pekarangan perumahan dan lahan RTH	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
												membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penyediaan Sistem Pengolahan limbah terpadu domestik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penyediaan sistem persampahan dengan metode 3 R	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penanaman vegetasi serta ruang hijau ditempatkan pada setiap pinggir sungai serta saluran drainase	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pembuatan Saluran drainase dengan memperhitungkan beban debit limpasan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pengembangan pertanian lahan terbatas (pemanfaatan pekarangan rumah)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
													Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pemanfaatan limbah rumah dapur organik (sisa makanan, sayuran) sebagai pupuk kompos (organik)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pemanfaatan sumber energi alternatif pada aktivitas perumahan (Panas Bumi, Solar Panel, Biogas)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)												
	Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang sesuai dengan keteintensitas pemanfaatan ruang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penyediaan sarana dan prasarana umum dalam setiap pengembangan dan pembangunan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
	▪ Relokasi rumah kepadatan sedang yang berada pada zona lindung	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ Penyediaan sarana pengelolaan limbah	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ <i>Penyediaan ruang terbuka hijau dalam pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ <i>Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pembentukan bank sampah skala rumah tangga.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perumahan kepadatan sedang sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)											
	Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan limbah	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan dalam	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ <i>Pengembangan RTH pada penetapan PSU berupa penyediaan RTH</i>	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ <i>Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan</i>	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perumahan kepadatan rendah sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, Kementerian/Lembaga yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Prangkat Daerah yang membidangi perumahan permukiman, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta
B.2.G	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
1	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)												
	▪ Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kota	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
												Swasta	
	▪ Pemeliharaan Pengembangan RTH Publik SPU Skala Kota	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Penyediaan sistem pengelolaan limbah	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pemantauan kualitas lingkungan hidup yang meliputi air dan udara	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Penyediaan minimal sistem pengumpulan limbah B3	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pengolahan sampah organik dari aktivitas SPU sebagai pupuk kompos (organik)	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
													Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pemanfaatan sumber energi alternatif pada aktivitas perdagangan & jasa (Panas Bumi, Solar Panel, Biogas)	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pemanfaatan kembali (reuse) air pasca berwudhu untuk menyiram tanaman atau flush water	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kota sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)												
	▪ Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kecamatan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
													Swasta
	▪ Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala Kecamatan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kecamatan sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membdiangi Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Provinsi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)												
	▪ Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kelurahan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
	▪ Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala Kelurahan	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kecamatan sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
4	Sub Zona SPU Skala RW (SPU-4)												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
	▪ Pengembangan dan peningkatan SPU Skala RW	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
	▪ Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala RW	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala RW sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; ▪ SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan ▪ SWP D Blok I.D.1										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Swasta
B.2.H	Zona Perdagangan dan Jasa												
1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K1)												
	▪ Pengembangan pusat kegiatan perekonomian baru	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan,	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)	
	<i>kontainer sampah, hidrant, dan pelengkap lain</i>											membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Pembangunan System pengolahan limbah terpadu</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Penambahan vegetasi</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Pemantauan kualitas udara dan air</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Pengolahan sampah organic dari aktivitas perdagangan dan jasa sebagai pupuk kompos (organic)</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ <i>Pemanfaatan sumber energi alternatif pada aktivitas perdagangan & jasa (Panas Bumi, Solar Panel, Biogas)</i>	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan - SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	▪ SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan ▪ SWP I.C Blok I.C.2.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K2)												
	▪ Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	▪ SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	▪ SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengoptimalan fungsi pasar desa yang pusat pemasaran hasil produksi skala lokal	▪ SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan menyediakan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, kontainer sampah, hidrant, dan pelengkap lain	▪ SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	▪ SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan ▪ SWP I.B Blok I.B.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040 - 2044)
	sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%												yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K3)												
	▪ Pengembangan perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	▪ Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perumahan Permukiman dan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
B.2.I	Zona Perkantoran (KT)												
	Sub-Zona Perkantoran (KT)												
1	Pengembangan kawasan perkantoran publik/pemerintahan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan permukiman dan tata ruang
2	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran seperti penyediaan ruang parkir, fasilitas sosial berupa sarana peribadatan, sarana olahraga, sarana	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040 - 2044)		
	pengelolaan air limbah dan persampahan	SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.											membidangi perumahan permukiman dan tata ruang
3	Pengembangan sumur resapan dan lubang biopori sebagai upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan permukiman dan tata ruang
4	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perkantoran sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten yang membidangi perumahan permukiman dan tata ruang
B.2.J	Zona Transportasi (TR)												
	Sub-Zona Transportasi (TR)												
1	Studi kelayakan alokasi rencana terminal tipe C dan terminal barang	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
2	Perencanaan terminal tipe C dan terminal barang	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
3	Pembangunan terminal tipe C dan terminal barang	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
4	Penataan dan pemeliharaan zona transportasi	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
5	Pengembangan trayek angkutan umum	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
6	Pengembangan dan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung Zona Transportasi.	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
7	Penyediaan sarana pengolahan sampah dan limbah di zona transportasi.	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
8	Pemantauan kualitas udara dan air zona transportasi secara berkala	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
													membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
9	Penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap polutan	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
10	Pembangunan sumur resapan dan biopori	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
11	Pembangunan system drainase	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Kabupaten yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
B.2.K	Zona Pertahanan Keamanan (HK)												
	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
1	Pemeliharaan dan Peningkatan Polisi Sektor Sambirejo	▪ SWP I.A Blok I.A.2										APBN	POLRI
2	Pemeliharaan dan Peningkatan Koramil 08 Sambirejo	▪ SWP I.A Blok I.A.2										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi pertahanan. TNI


 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P- 1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK- 2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU- 3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K- 3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1	0001	01111	PERTANIAN JAGUNG	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	0002	01112	PERTANIAN GANDUM	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	0003	01113	PERTANIAN KEDELAI	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	0004	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	0005	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	0006	01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	0007	01117	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL MINYAK WUJEN	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	0008	01118	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	0009	01119	PERTANIAN SEREALIA LAINYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	0010	01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	0011	01122	PERTANIAN PADI INBRIDA	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	0012	01131	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	0013	01132	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	0014	01133	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	0015	01134	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	0016	01135	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	0017	01136	PERTANIAN JAMUR	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	0018	01137	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	0019	01139	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINYA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	0020	01140	PERKEBUNAN TEBU	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	0021	01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	0022	01160	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	0023	01191	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	0024	01192	PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	X	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25	0025	01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	0026	01194	PEMBIITAN TANAMAN BUNGA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	0027	01199	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINYA YTDL	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	0028	01210	PERTANIAN BUAH ANGGUR	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	0029	01220	PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	0030	01230	PERTANIAN BUAH JERUK	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	0031	01240	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	0032	01251	PERTANIAN BURAH BERI	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	0033	01252	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
34	0034	01253	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	0035	01259	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINYA	X	I	I	I	I	I	B1	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)					Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WPP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)		
91	0091	01640	PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
92	0092	01711	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	0093	01712	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
94	0094	01713	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	0095	01714	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	0096	01715	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
97	0097	01719	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
98	0098	01721	PENANGKARAN PRIMATA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
99	0099	01722	PENANGKARAN MAMALIA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
100	0100	01723	PENANGKARAN REPTIL	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
101	0101	01724	PENANGKARAN BURUNG	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
102	0102	01725	PENANGKARAN INSEKTA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
103	0103	01726	PENANGKARAN ANGGREK	X	X	B1	B1	X	B1	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
104	0104	01727	PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
105	0105	01729	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	B1	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
106	0106	02111	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
107	0107	02112	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
108	0108	02113	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
109	0109	02119	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
110	0110	02121	PEMANFAATAN KAYU HUTAN ALAM	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
111	0111	02122	PEMANFAATAN KAYU HASIL RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN ALAM	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
112	0112	02130	PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
113	0113	02140	PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
114	0114	02201	PEMANENAN KAYU	X	X	I	I	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
115	0115	02202	USAHA PEMUNGUTAN KAYU	X	X	I	I	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
116	0116	02209	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	X	X	I	I	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
117	0117	02301	PEMUNGUTAN GETAH KARET	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
118	0118	02302	PEMUNGUTAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
119	0119	02303	PEMUNGUTAN GETAH PINUS	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
120	0120	02304	PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
121	0121	02305	PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
122	0122	02306	PEMUNGUTAN DAMAR	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
123	0123	02307	PEMUNGUTAN MADU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
124	0124	02308	PEMUNGUTAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
125	0125	02309	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
126	0126	02401	JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B2	X	X	
127	0127	02402	JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
128	0128	02403	JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL	X	B1	X	X	X	X	B1	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B2	X	X	
129	0129	02404	JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B2	X	X	
130	0130	02409	JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B2	X	X	
131	0131	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	0132	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	0133	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	0134	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	0135	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK / BENIH IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	0136	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	0137	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	0138	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	0139	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	0140	03121	PENANGKAPAN PISCES / IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
141	0141	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
142	0142	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X
143	0143	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	X	B1,B2	B													

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
248	0248	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
249	0249	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
250	0250	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
251	0251	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
252	0252	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
253	0253	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
254	0254	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
255	0255	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
256	0256	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
257	0257	10291	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
258	0258	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
259	0259	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
260	0260	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
261	0261	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FEMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
262	0262	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
263	0263	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
264	0264	10298	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
265	0265	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
266	0266	10311	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
267	0267	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
268	0268	10313	INDUSTRI PENERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
269	0269	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
270	0270	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
271	0271	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X</	

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-6)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
408	0408	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X									B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
409	0409	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
410	0410	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
411	0411	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
412	0412	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
413	0413	16105	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
414	0414	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
415	0415	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
416	0416	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
417	0417	16214	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
418	0418	16215	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
419	0419	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
420	0420	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
421	0421	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
422	0422	16291	INDUSTRI KAYU ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
423	0423	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
424	0424	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
425	0425	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
426	0426	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
427	0427	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
428	0428	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
429	0429	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
430	0430	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
431	0431	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
432	0432	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
433	0433	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
434	0434	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
435	0435	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
436	0436	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
437	0437	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
438	0438	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
439	0439	18113	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
440	0440	18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
441	0441	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
442	0442	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
443	0443	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
444	0444	19211	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
445	0445	19212	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
446	0446	19213	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
447	0447	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
448	0448	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
449	0449	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
450	0450	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
451	0451	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
452	0452	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
453	0453	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
454	0454	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
455	0455	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X				X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X		
456	0456	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2				B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
457	0457	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X</																										

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kacamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
						Sub-Zona Taman Kacamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)					Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)				
490	0490	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
491	0491	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
492	0492	21013	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
493	0493	21014	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
494	0494	21015	INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
495	0495	21021	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
496	0496	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
497	0497	21023	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
498	0498	21024	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
499	0499	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
500	0500	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
501	0501	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
502	0502	22122	INDUSTRI REMILLING KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
503	0503	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
504	0504	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
505	0505	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
506	0506	22193	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
507	0507	22194	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
508	0508	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
509	0509	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
510	0510	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
511	0511	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
512	0512	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
513	0513	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
514	0514	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
515	0515	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
516	0516	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
517	0517	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
518	0518	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
519	0519	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
520	0520	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
521	0521	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
522	0522	23124	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
523	0523	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
524	0524	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
525	0525	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
526	0526	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
527	0527	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
528	0528	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
529	0529	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
530	0530	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
531	0531	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
532	0532	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
533	0533	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	X	B1.B2.B3	B1.B2.B3	B1.B2.B3	X	X	X	
534	0534	23941	INDUSTRI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
535	0535	23942	INDUSTRI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	
536	0536	23943	INDUSTRI GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	
537	0537	2395																															

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)	
561	0561	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
562	0562	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
563	0563	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
564	0564	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
565	0565	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
566	0566	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
567	0567	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
568	0568	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
569	0569	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	
570	0570	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
571	0571	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
572	0572	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
573	0573	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
574	0574	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
575	0575	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
576	0576	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
577	0577	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
578	0578	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
579	0579	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
580	0580	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
581	0581	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
582	0582	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
583	0583	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
584	0584	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
585	0585	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
586	0586	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
587	0587	26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X																

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)	
629	0629	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
630	0630	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
631	0631	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
632	0632	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
633	0633	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
634	0634	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
635	0635	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
636	0636	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
637	0637	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
638	0638	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
639	0639	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
640	0640	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
641	0641	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
642	0642	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
643	0643	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
644	0644	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
645	0645	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
646	0646	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
647	0647	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
648	0648	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
649	0649	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
650	0650	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
651	0651	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
652	0652	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
653	0653	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
654	0654	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
655	0655	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
656	0656	28291	INDUSTRI MESIN PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
657	0657	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
658	0658	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
659	0659	29101	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
660	0660	29102	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
661	0661	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR EMPAT LEBIH INDUSTRI DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
662	0662	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
663	0663	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
664	0664	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
665	0665	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
666	0666	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PERAHU TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
667	0667	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
668	0668	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
669	0669	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
670	0670	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
671	0671	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
672	0672	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
673	0673	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DANKURSI RODATERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
674	0674	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
675	0675	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	
676	0676																																

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)			
						Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)					Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)						
697	0697	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/ GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X		
698	0698	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X		
699	0699	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X		
700	0700	32905	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X		
701	0701	32906	INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X		
702	0702	32907	INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X		
703	0703	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X		
704	0704	33111	REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UJAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
705	0705	33112	REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
706	0706	33119	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
707	0707	33121	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
708	0708	33122	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
709	0709	33131	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
710	0710	33132	REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
711	0711	33133	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
712	0712	33141	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
713	0713	33142	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
714	0714	33149	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
715	0715	33151	REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
716	0716	33152	REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
717	0717	33153	REPARASI PESAWAT TERBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
718	0718	33159	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
719	0719	33190	REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
720	0720	33200	INSTALASI PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	X	X		
721	0721	35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
722	0722	35112	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
723	0723	35113	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
724	0724	35114	Penjualan Tenaga Listrik	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
725	0725	35115	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
726	0726	35116	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
727	0727	35117	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
728	0728	35118	DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
729	0729	35121	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
730	0730	35122	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
731	0731	35129	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
732	0732	35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
733	0733	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
734	0734	35203	PENGADAAN GAS BIO	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
735	0735	35301	PENGADAAN UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
736	0736	35302	PRODUKSI ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
737	0737	36001	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
738	0738	36002	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
739	0739	36003	AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
740	0740	37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
741	0741	37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X																												

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P- 1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK- 2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU- 3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K- 3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
856	0856	46329	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
857	0857	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
858	0858	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
859	0859	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
860	0860	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
861	0861	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
862	0862	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
863	0863	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
864	0864	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
865	0865	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
866	0866	46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
867	0867	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
868	0868	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
869	0869	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
870	0870	46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
871	0871	46441	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
872	0872	46442	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
873	0873	46443	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
874	0874	46444	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
875	0875	46445	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
876	0876	46446	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
877	0877	46447	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
878	0878	46448	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
879	0879	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
880	0880	46492	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
881	0881	46493	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
882	0882	46494	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
883	0883	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
884	0884	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
885	0885	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
886	0886	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
887	0887	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
888	0888	46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
889	0889	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
890	0890	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
891	0891	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
892	0892	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
893	0893	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
894	0894	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
895	0895	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
896	0896	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
897	0897	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BUIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
898	0898	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
899	0899	46632	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
900	0900	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
901	0901	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
902	0902	46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
903	0903	46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
904	0904	46637	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
905	0905	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
906	0906	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
907	0907	46641	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
908																																

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
917	0917	46694	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X			X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
918	0918	46695	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
919	0919	46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
920	0920	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
921	0921	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
922	0922	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
923	0923	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X	
924	0924	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X	
925	0925	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X	
926	0926	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
927	0927	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
928	0928	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
929	0929	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
930	0930	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
931	0931	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
932	0932	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
933	0933	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
934	0934	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
935	0935	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
936	0936	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
937	0937	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
938	0938	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
939	0939	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
940	0940	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
941	0941	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
942	0942	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
943	0943	47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
944	0944	47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
945	0945	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
946	0946	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
947	0947	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
948	0948	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
949	0949	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
950	0950	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
951	0951	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
952	0952	47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
953	0953	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
954	0954	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
955	0955	47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
956	0956	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
957	0957	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
958	0958	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
959	0959	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
960	0960	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
961	0961	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
962	0962	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
963	0963	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
964	0964	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
965	0965	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
966	0966	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
967	0967	47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
968	0968	47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
969	0969	47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLAST																														

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WPP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
970	0970	47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
971	0971	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
972	0972	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
973	0973	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
974	0974	47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
975	0975	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
976	0976	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
977	0977	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
978	0978	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
979	0979	47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
980	0980	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
981	0981	47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
982	0982	47721	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
983	0983	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
984	0984	47723	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
985	0985	47724	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
986	0986	47725	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
987	0987	47726	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
988	0988	47727	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
989	0989	47728	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
990	0990	47729	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUME DAN KOSMETIK LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
991	0991	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
992	0992	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
993	0993	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
994	0994	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
995	0995	47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
996	0996	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
997	0997	47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
998	0998	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
999	0999	47741	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1000	1000	47742	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1001	1001	47743	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1002	1002	47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1003	1003	47745	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1004	1004	47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1005	1005	47749	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1006	1006	47751	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1007	1007	47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1008	1008	47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1009	1009	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGA/SIKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1010	1010	47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1011	1011	47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1012	1012	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1013	1013	47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1014	1014	47771	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1015	1015	47772	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1016	1016	47773	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1017	1017	47774	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1018	1018	47779	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1019	1019	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1020	1020	47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1021	1021	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1022	1022	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1		

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1029	1029	47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1030	1030	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1031	1031	47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1032	1032	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1033	1033	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1034	1034	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1035	1035	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1036	1036	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1037	1037	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1038	1038	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1039	1039	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1040	1040	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1041	1041	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1042	1042	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1043	1043	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1044	1044	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1045	1045	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1046	1046	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1047	1047	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1048	1048	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1049	1049	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1050	1050	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1051	1051	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1052	1052	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1053	1053	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1054	1054	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1055	1055	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1056	1056	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1057	1057	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1058	1058	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1059	1059	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1060	1060	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X																								

NO.	id. kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
1077	1077	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1078	1078	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1079	1079	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1080	1080	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1081	1081	47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1082	1082	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1083	1083	47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1084	1084	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1085	1085	47892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1086	1086	47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1087	1087	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1088	1088	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1089	1089	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1090	1090	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1091	1091	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1092	1092	47911	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1093	1093	47912	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1094	1094	47913	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1095	1095	47914	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1096	1096	47919	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1097	1097	47920	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1098	1098	47991	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1099	1099	47992	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1100	1100	47993	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1101	1101	47994	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1102	1102	47995	PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1103	1103	47996	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1104	1104	47997	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAH RAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1105	1105	47998	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1106	1106	47999	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1107	1107	49110	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1108	1108	49120	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1109	1109	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1110	1110	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1111	1111	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1112	1112	49214	ANGKUTAN BUS KOTA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1113	1113	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1114	1114	49216	ANGKUTAN BUS KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1115	1115	49219	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1116	1116	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1117	1117	49229	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1118	1118	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1119	1119	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1120	1120	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1121	1121	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1122	1122	49414	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1123	1123	49415	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1124	1124	49419	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2
1125	1125	49421	ANGKUTAN TAKSI	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X</																						

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlembungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlembungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTM-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTM-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
1194	1194	52213	AKTIVITAS JALAN TOL	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X
1195	1195	52214	AKTIVITAS PERPAKKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1196	1196	52215	AKTIVITAS PERPAKKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1197	1197	52219	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1198	1198	52221	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1199	1199	52222	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1200	1200	52223	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBERANGAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1201	1201	52224	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1202	1202	52225	AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1203	1203	52229	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1204	1204	52231	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1205	1205	52232	JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (SINGLE PURPOSE)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
1206	1206	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1207	1207	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
1208	1208	52292	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1209	1209	52293	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1210	1210	52294	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1211	1211	52295	ANGKUTAN MULTIMODA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1212	1212	52296	JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
1213	1213	52297	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	
1214	1214	52298	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1215	1215	52299	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1216	1216	53100	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1217	1217	53201	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1218	1218	53202	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1219	1219	55110	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1220	1220	55120	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1221	1221	55130	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1222	1222	55191	PENGINAPAN REMAJA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1223	1223	55192	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X	
1224	1224	55193	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1225	1225	55194	APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1226	1226	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1227	1227	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1228	1228	56101	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1229	1229	56102	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	B1,T	B1,T	B1,T	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1230	1230	56103	KEDAI MAKANAN	X	B1,T	B1,T	B1,T	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1231	1231	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	B1,T	B1,T	B1,T	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1232	1232	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	B1,T	B1,T	B1,T	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1233	1233	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1234	1234	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1235	1235	56301	BAR	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B1	X	
1236	1236	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B1	X	
1237	1237	56303	RUMAH MINUM/KAFE	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1238	1238	56304	KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1	B1	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1239	1239	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1	B1	I	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1240	1240	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1	B1	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X
1241	1241	58110	PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
1242	1242	58120	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
1243	1243	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
1244	1244	58190	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
1245	1245	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
1246	1246	5911																															

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)					Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)		
1358	1358	66115	PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1359	1359	66116	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1360	1360	66117	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1361	1361	66118	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1362	1362	66119	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1363	1363	66121	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1364	1364	66122	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1365	1365	66123	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1366	1366	66124	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1367	1367	66131	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1368	1368	66132	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1369	1369	66139	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1370	1370	66141	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1371	1371	66142	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1372	1372	66143	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1373	1373	66144	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1374	1374	66145	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1375	1375	66146	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1376	1376	66147	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1377	1377	66149	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1378	1378	66151	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1379	1379	66152	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1380	1380	66153	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1381	1381	66154	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1382	1382	66159	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1383	1383	66160	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1384	1384	66171	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1385	1385	66172	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1386	1386	66173	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1387	1387	66174	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1388	1388	66179	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1389	1389	66191	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1390	1390	66192	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1391	1391	66193	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1392	1392	66194	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1393	1393	66195	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1394	1394	66199	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1395	1395	66211	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1396	1396	66212	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1397	1397	66221	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1398	1398	66222	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1399	1399	66223	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1400	1400	66224	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1401	1401	66225	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1402	1402	66226	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1403	1403	66291	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1404	1404	66292	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1405	1405	66299	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1406	1406	66311	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1
1407	1407	66312	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I		

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
1440	1440	71206	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1441	1441	71207	JASA KLASIFIKASI KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1442	1442	71208	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1443	1443	71209	ANALISA DAN UJI TEKNIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1444	1444	72101	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1445	1445	72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1446	1446	72103	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1447	1447	72104	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1448	1448	72105	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	I	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1449	1449	72106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1450	1450	72107	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1451	1451	72109	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1452	1452	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1453	1453	72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1454	1454	72203	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1455	1455	72204	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1456	1456	72205	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1457	1457	72206	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1458	1458	72209	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.	X	B1	X	X	X	X	X	I	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1459	1459	73100	PERIKLANAN	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1460	1460	73201	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1461	1461	73202	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1462	1462	74111	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1463	1463	74112	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1464	1464	74113	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1465	1465	74114	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1466	1466	74115	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1467	1467	74116	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAHA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1468	1468	74117	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1469	1469	74118	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1470	1470	74119	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1471	1471	74120	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1472	1472	74130	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1473	1473	74141	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1474	1474	74142	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1475	1475	74149	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1476	1476	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1477	1477	74202	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1478	1478	74311	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1479	1479	74312	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1480	1480	74321	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1481	1481	74322	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1482	1482	74901	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1483	1483	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1484	1484	74909	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1485	1485	75000	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1486	1486	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1487	1487	77210	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAHA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1488	1488	77220	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1489	1489	77291	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1490	1490	77292	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1491	1491	77293	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1492	1492	77294	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1493	1493	77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X																										

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
1500	1500	77322	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT-ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1501	1501	77323	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1502	1502	77329	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1503	1503	77391	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1504	1504	77392	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1505	1505	77393	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1506	1506	77394	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1507	1507	77395	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1508	1508	77399	AKTIVITAS PENYEWaan DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1509	1509	77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1510	1510	78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1511	1511	78102	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1512	1512	78103	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1513	1513	78104	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1514	1514	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1515	1515	78300	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1516	1516	78411	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1517	1517	78412	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1518	1518	78413	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1519	1519	78414	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1520	1520	78415	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1521	1521	78416	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1522	1522	78417	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1523	1523	78419	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1524	1524	78421	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1525	1525	78422	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1526	1526	78423	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1527	1527	78424	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1528	1528	78425	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1529	1529	78426	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1530	1530	78427	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1531	1531	78429	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1532	1532	78431	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1533	1533	78432	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1534	1534	78433	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1535	1535	78434	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1536	1536	78435	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1537	1537	78436	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1538	1538	78437	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1539	1539	78439	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1540	1540	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1541	1541	79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1542	1542	79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1543	1543	79121	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1544	1544	79122	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1545	1545	79129	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1546	1546	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1547	1547	79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1548	1548	79921	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1549	1549	79922	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1550	1550	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1551	1551	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1552	1552	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1553	1553	80300	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1							

NO.	id. kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-5)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-6)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)		
1562	1562	82302	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1563	1563	82911	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1564	1564	82912	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1565	1565	82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1566	1566	82990	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1567	1567	84111	LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1568	1568	84112	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1569	1569	84113	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1570	1570	84114	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1571	1571	84115	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1572	1572	84119	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1573	1573	84121	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1574	1574	84122	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1575	1575	84123	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1576	1576	84124	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1577	1577	84125	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1578	1578	84126	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1579	1579	84127	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1580	1580	84129	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1581	1581	84131	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1582	1582	84132	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1583	1583	84133	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1584	1584	84134	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1585	1585	84135	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1586	1586	84136	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1587	1587	84137	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1588	1588	84138	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1589	1589	84139	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFIISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1590	1590	84210	HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1591	1591	84221	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1592	1592	84222	ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	I
1593	1593	84223	ANGKATAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	I	
1594	1594	84224	ANGKATAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	I
1595	1595	84231	KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	I
1596	1596	84232	PERTAHANAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	I
1597	1597	84233	LEMBAGA PERADILAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1598	1598	84234	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1599	1599	84300	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1600	1600	85111	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1601	1601	85112	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1602	1602	85121	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	B1	
1603	1603	85122	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1604	1604	85131	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1605	1605	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1606	1606	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1607	1607	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1608	1608	85135	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1609	1609	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1610	1610	85141	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1611	1611	85142	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1612	1612	85143	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2								

NO.	id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
1628	1628	85261	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1629	1629	85262	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1630	1630	85263	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1631	1631	85270	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1632	1632	85311	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1633	1633	85312	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1634	1634	85321	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1635	1635	85322	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1636	1636	85331	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1637	1637	85332	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1638	1638	85340	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MAHAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1639	1639	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1640	1640	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1641	1641	85430	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1642	1642	85440	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1643	1643	85451	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1644	1644	85452	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1645	1645	85459	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1646	1646	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1647	1647	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1648	1648	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1649	1649	85494	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1650	1650	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1651	1651	85496	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1652	1652	85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1653	1653	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1654	1654	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1655	1655	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1656	1656	86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1657	1657	86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1658	1658	86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1659	1659	86104	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1660	1660	86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1661	1661	86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1662	1662	86201	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1663	1663	86202	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1664	1664	86203	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1665	1665	86901	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1666	1666	86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1667	1667	86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1668	1668	86904	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1669	1669	87100	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1670	1670	87201	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1671	1671	87202	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1672	1672	87203	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL , PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1673	1673	87301	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1674	1674	87302	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1675	1675	87303	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1676	1676	87304	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1677	1677	87305	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	B1,B2</														

NO.	id. kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kamakaman (RTM-3)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTM-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTM-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTM-8)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
1702	1702	90090	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1703	1703	91011	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1704	1704	91012	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1705	1705	91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	I	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1706	1706	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1707	1707	91023	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1708	1708	91024	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1709	1709	91025	TAMAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1710	1710	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1711	1711	91031	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1712	1712	91032	TAMAN NASIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1713	1713	91033	TAMAN HUTAN RAYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1714	1714	91034	TAMAN WISATA ALAM	X	X	I	I	I	X	B1	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1715	1715	91035	SUAKA MARGASATWA	X	I	I	I	I	X	B1	I	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1716	1716	91036	TAMAN LAUT	X	I	I	I	I	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1717	1717	91037	KAWASAN BURU	X	X	I	I	I	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1718	1718	91038	HUTAN LINDUNG	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1719	1719	91039	AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1720	1720	92000	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1721	1721	93111	FASILITAS STADIUM	X	X	I	I	X	I	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1722	1722	93112	FASILITAS SIRKUIT	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1723	1723	93113	FASILITAS SELANGGANG / ARENA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1724	1724	93114	FASILITAS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1725	1725	93115	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1726	1726	93116	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN / FITNESS CENTER	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1727	1727	93119	PENGLOLAAN FASILITAS OLARAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1728	1728	93121	KLUB SEPAK BOLA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1729	1729	93122	KLUB GOLF	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1730	1730	93123	KLUB RENANG	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1731	1731	93124	KLUB TENIS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1732	1732	93125	KLUB TINJU	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1733	1733	93126	KLUB BELA DIRI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1734	1734	93127	KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1735	1735	93128	KLUB BOWLING	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1736	1736	93129	KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1737	1737	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1738	1738	93192	OLAHAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1739	1739	93193	AKTIVITAS PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1740	1740	93194	BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1741	1741	93195	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1742	1742	93199	AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1743	1743	93211	TAMAN REKREASI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1744	1744	93219	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1745	1745	93221	PEMANDIAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1746	1746	93222	PENGLOLAAN GOA	X	X	B1	B1	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1747	1747	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM	X	X	B1	B1	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1748	1748	93224	WISATA PANTAI	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1749	1749	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1750	1750	93231	WISATA AGRO	X	B1	X	X	X	X	I	B1	X	B1	B1,B2	B1	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1751	1751	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN / BINAAN MANUSIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	B1	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1752	1752	93241	ARUNG JERAM	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	X	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1753	1753	93242	WISATA SELAM	X	B1	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1754	1754	93243	DERMAGA MARINA	X	X	B1	B1	X	B1	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	X	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	
1755	1755	93244	KOLAM PEMANCINGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1,B2	B1	B1	X	X	X														

NO.	Id_kegiatan	KODE 5 DIGIT KBLU	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)				Zona Perikanan (K)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
				Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-1)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-2)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-3)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-4)	Suaka Margasatwa (SM)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Perkebunan Rakyat (KR)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (K-1)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-1)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-3)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
1795	1795	-	YAYASAN PENDIDIKAN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1796	1796	-	YAYASAN KEMANUSIAAN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1797	1797	-	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1798	1798	-	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBD	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1799	1799	-	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1800	1800	-	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1801	1801	-	KEGIATAN SEKTOR INFORMAL	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1

KETERANGAN:

I

T

B1

B2

B3

X

permanfaatan diizinkan

meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona dari pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas);

meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait: yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang

meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin)

meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku

permanfaatan tidak diizinkan



KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLE Maksimum	Luas Kavling Minimum	KDH Minimum (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	30	0,6	0	70
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	60	1,2	0	20
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	0	80
	Taman Kelurahan	RTH-4	40	0,4	0	60
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	0	80
	Jalur Hjalur	RTH-8	30	0,3	0	70
Zona Konservasi	Suaka Margasatwa	SM	10	0,1	0	90
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0
Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan rakyat	KR	60	1,2	0	20
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	0	90
	Hortikultura	P-2	60	1,8	0	20
	Perkebunan	P-3	60	0,6	0	20
	Peternakan	P-4	60	1,2	0	20
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	60	1,2	0	20
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	60	1,8	0	20
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60	2,4	60	20
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,8	72	20
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	90	20
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	2,4	0	20
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,8	0	20
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,2	0	20
	SPU Skala RW	SPU-4	60	0,6	0	20
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60	2,4	0	20
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	0	20
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	1,2	0	20
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2,4	0	20
Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	1,8	0	20
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,8	0	20

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m) Minimum										
				Terhadap Jalan		Lingkungan Primer	Lingkungan Sekunder	Sungai Bertanggul	Terhadap Sungai			Terhadap Jaringan Irigasi		
				Lokal Primer	Lokal Sekunder				Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai < 3 m	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai 3 < 20m	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai > 20m	Jaringan Irigasi Primer	Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan Irigasi Tersier
Zona Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Taman Kelurahan	RTH-4	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Pemukaman	RTH-7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jalur Hjau	RTH-8	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Konservasi	Suaka Margasatwa	SM	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Hortikultura	P-2	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Perkebunan	P-3	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Peternakan	P-4	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	16	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	16	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	SPU Skala RW	SPU-4	4	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	16	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	8	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	16	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Transportasi	Transportasi	TR	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	10.75	6.75	5	5	8	10	15	30	3	2.5	2

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
Zona Badan Air	Badan Air	BA	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya.
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	- jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾ diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - jaringan prasarana⁷⁾ dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;
	Taman Kelurahan	RTH-4	- jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; - jaringan prasarana⁷⁾ dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Pemukaman	RTH-7	- Jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾ minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Jalur Hjau	RTH-8	- mengembangkan jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah karbon dan tidak menyerap air secara besar; - penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi (Stasiun) wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
Zona Konservasi	Suaka Margasatwa	SM	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - sempadan sungai harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10% - Menyediakan kawasan resapan air - penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT. PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegiatan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	- ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; - tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan - penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. - Untuk kegaitan pada sub zona P-1 diluar LP2B wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Hortikultura	P-2	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kab. Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT. PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegaitan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Perkebunan	P-3	- ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; - tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan - penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan. - wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 20%
	Peternakan	P-4	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kab. Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT. PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegaitan industri pada sub zona P-4 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan; - penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kab. Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT. PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	- Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil - menyediakan hidran⁷⁾ untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; - Penyediaan ruang parkir³⁾ sesuai dengan standar kebutuhan; - Penyediaan ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾; - Penyediaan pengolahan limbah domestic dan non domestik; - Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki; - fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	- Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; - RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; - Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; - Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; - Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling; - Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; - Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; - Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; - Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; - Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; - Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; - Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; - Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; - Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; - Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan³⁾; - Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; - Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; - Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	- Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda ⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; - RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; - Jalur sepeda ⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• jalur sepeda ⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10%²⁾ dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾; • Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH ²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • Penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kabupaten Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat; • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; • Fasilitas pendukung pada zona sarana pelayanan umum berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Penyediaan utilitas perkotaan ⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• Penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kabupaten Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat; • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestic; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kabupaten Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
	SPU Skala RW	SPU-4	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • penyediaan air minum dapat bersumber dari Perumda Air Minum Kabupaten Sragen atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter⁴⁾ ; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Transportasi	Transportasi	TR	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; • menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Ketentuan dan Keharusan: 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40/60 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya. 4) Terdapat jaringan air

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD Larangan : 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD

Keterangan:

- 1) Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - e. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan
 - a. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
- 2) Ketentuan Ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%.
- 3) Ketentuan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
 - a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi;
 - e. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - f. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- 4) Ketentuan jalur sepeda, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam
- 5) Ketentuan fasilitas sosial, meliputi:
 - a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- 6) Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi:
 - a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang

- f. menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan
- g. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter.

7) Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi:

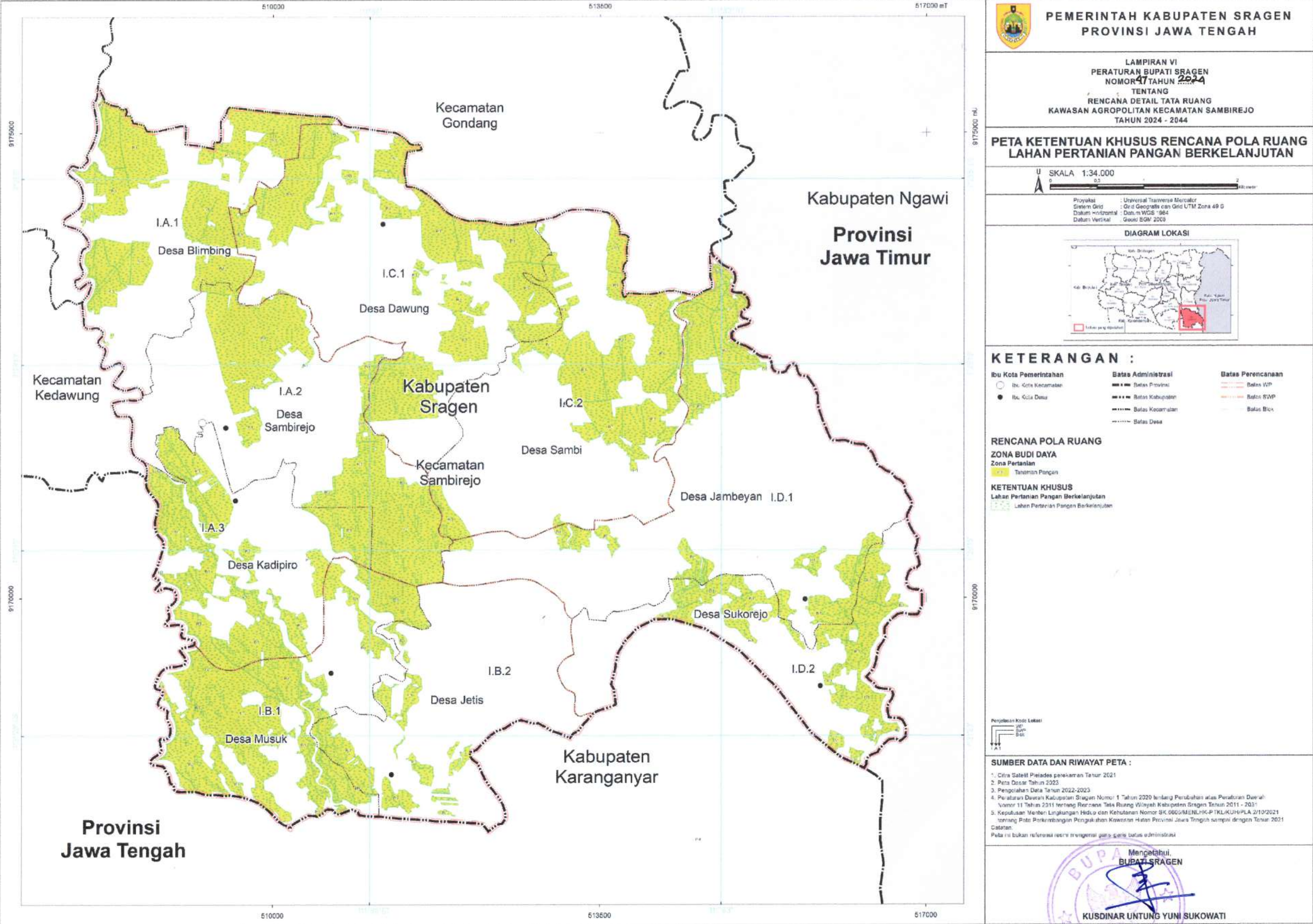
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
- e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
- f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah,

sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;

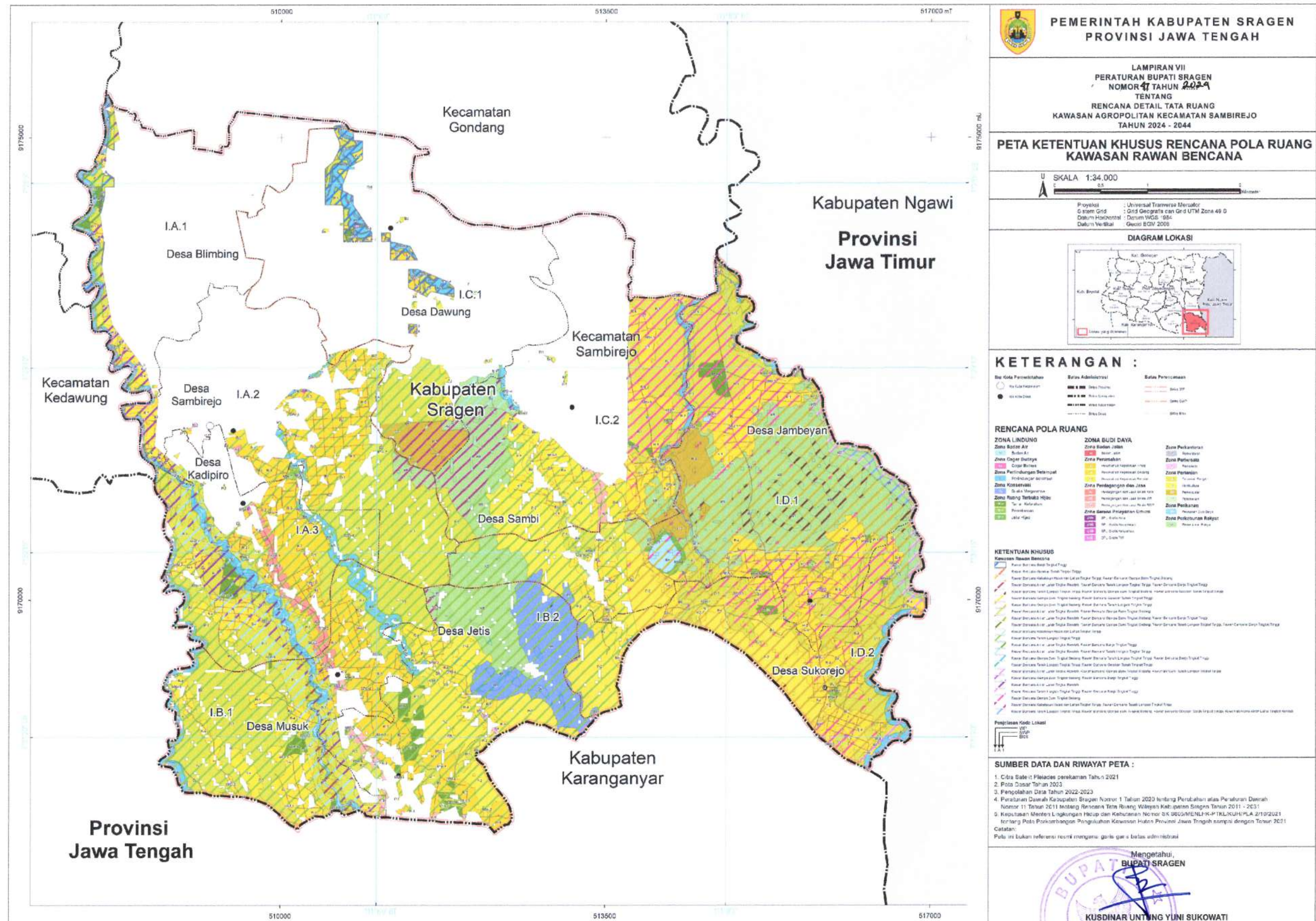
- g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public;
- h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²; dan
- i. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal .
- j. wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²)


BUPATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

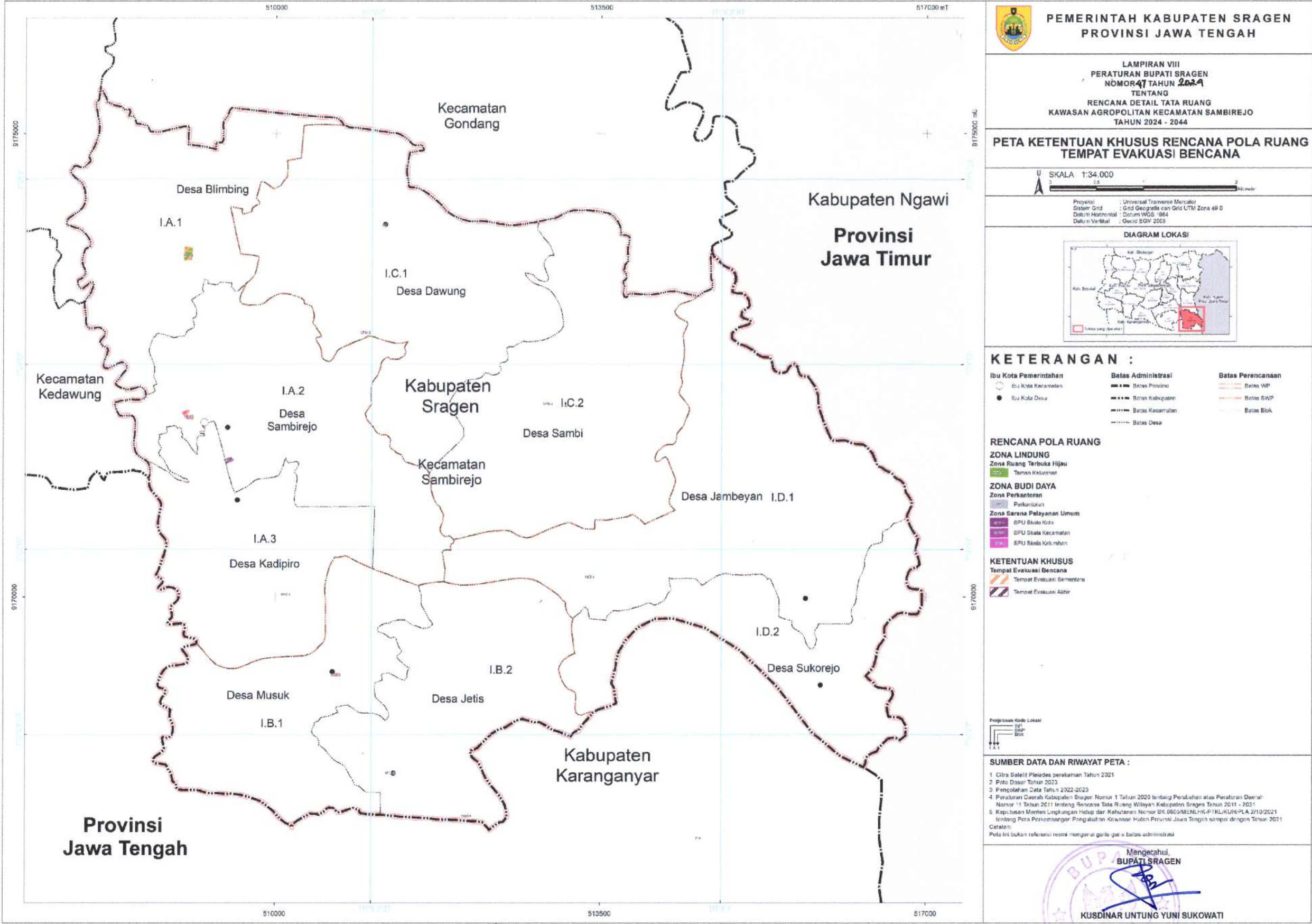
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR **47** TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044

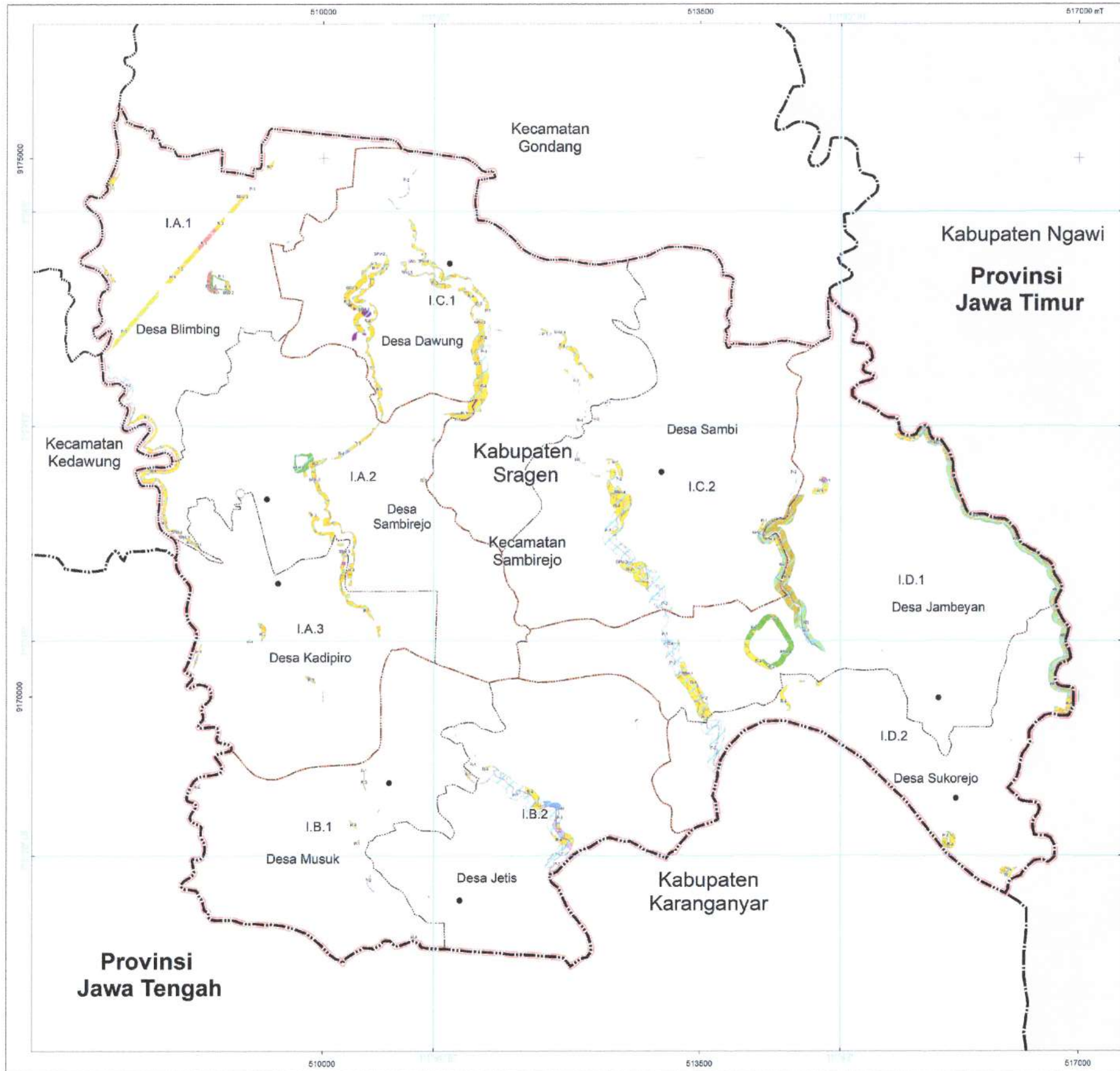


LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN SAMBIREJO
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**

SKALA 1:34.000

[illegible]

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS



KETERANGAN

ibu Kota Pemerintahan

ibu Kota Kecamatan

ibu Kota Desa

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Konservasi
Suaka Margasatwa
Zona Ruang Terbuka Hijau
Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

kon	Perumahan Kapadaten Bedah
kon	Perumahan Kapadaten Rendah
kon	Perdagangan dan Jasa
kon	Perdagangan dan Jasa Skala
kon	Sarana Pelayanan Umum
kon	SPU Skala Kota
kon	SPU Skala Kecamatan
kon	SPU Skala Kelurahan
kon	SPU Skala RW

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Perencanaan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala 1

Zona Sarana Pelayanan Umum

GPU Skaia R300a

SPU Sastra Kebutuhan

SPU 5xata R/V

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

- Sempadan Sungai
- Sempadan Stru, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Keterapaistrakan

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- Daftar Daftar Perijinan perijinan Tahun 2021
 Peta Dasar Tahun 2023
 Pengalihan Data Tahun 2022-2023
 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Rata-rata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031
 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENKLHK/PLH/KUPLA/2019/2021
 tentang Peta Perencanaan Pengukuran Kawasan Untuk Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar tahun 2021
 tahun 2021
 Peta 1:100.000 referensi untuk keperluan peta dasar administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI